



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN PERBATASAN NEGARA
DALAM MENJAGA PERTAHANAN KEAMANAN MELALUI PENJAGAAN
PILAR BATAS NEGARA**

di

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATAN (BNPP)

Disusun Oleh :

Nama : Drs. Ismawan Harijono, M.Si
NIP : 196902031989021001
Jabatan : Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara
Wilayah Darat
Instansi : Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Kelas/Kelompok : A/6
Nomor Daftar Hadir : 33
Angkatan : XXVIII

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

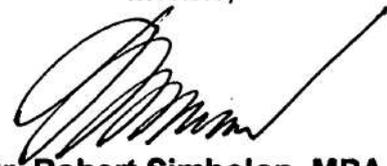
**FORM PERSETUJUAN MENTOR
PKN TK II ANGGARAN XXVIII TAHUN 2022**

Nama Peserta : Drs. Ismawan Harijono, M.Si
NDH : 196902031989021001
Instansi : Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Nama Mentor : Dr. Robert Simbolon, MPA
NIP : 196408281985031012
Jabatan : Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara
No. HP Mentor : 081310802844

Gagasan Perubahan : **"PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN
PERBATASAN NEGARA DALAM MENJAGA
PERTAHANAN KEAMANAN MELALUI PENJAGAAN
PILAR BATAS NEGARA"**

Disetujui oleh
Mentor,



**Dr. Robert Simbolon, MPA
NIP. 196408281985031012**

**FORMULIR PERSETUJUAN COACH
PKN TK II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2022**

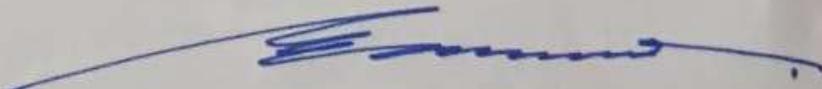
1. Nama Peserta	: Drs. Ismawan Harijono, M.Si
2. Intansi	: Badan Nasional Pengelola Perbatasan
3. Gagasan Perubahan	: "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN PERBATASAN NEGARA DALAM MENJAGA PERTAHANAN KEAMANAN MELALUI PENJAGAAN PILAR BATAS NEGARA"

Catatan terhadap Hasil Implementasi Proyek Perubahan Peserta

Layuh Rumi

Rekomendasi

Jakarta, Desember 2022
Coach


Drs. Machmudan Sadik, M.Si
Widyaiswara Ahli Utama (IV/c)
NIP. 197103051992021002

**LEMBAR PERSETUJUAN
HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN**

JUDUL : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN
PERBATASAN NEGARA DALAM MENJAGA
PERTAHANAN KEAMANAN MELALUI PENJAGAAN
PILAR BATAS NEGARA**

NAMA : Drs. Ismawan Harijono, M.Si.

NIP : 196902031989021001

PANGKAT/GOLONGAN : Pembina Utama Muda (IV/c)

INSTANSI : Badan Nasional Pengelola Perbatasan

JABATAN : Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat

KELAS/KELOMPOK :

NOMOR DAFTAR HADIR :

Disetujui diseminarkan pada Seminar Hasil Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII pada tanggal 7 Desember 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

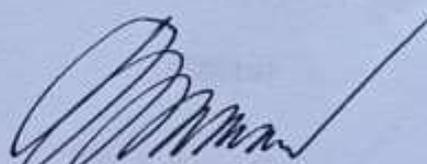
Jakarta, Desember 2022

Coach

Mentor



Drs. Machmudan Sadik, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197103051992021002



Dr. Robert Simbolon, MPA
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196408281985031012

Mengetahui:
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongroajaan dan Manajemen Kepemimpinan



Mohammad Rizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

**BERITA ACARA
SEMINAR HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN**

Pada hari : Rabu
Tanggal : 7 Desember 2022
Pukul : 08.00 - selesai
Tempat : BPSDM Kemendagri

Telah diseminarkan Hasil Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

JUDUL : "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN PERBATASAN NEGARA DALAM MENJAGA PERTAHANAN KEAMANAN MELALUI PENJAGAAN PILAR BATAS NEGARA"
DISUSUN OLEH : Drs. Ismawan Harijono, M.Si
JABATAN : Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
KELAS/KELOMPOK :
NOMOR DAFTAR HADIR :

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, Mentor, dan Coach.

Coach

Peserta

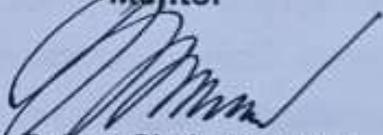

Drs. Machmudan Sadik, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197103051992021002


Drs. Ismawan Harijono, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196902031989021001

Penguji

Mentor


Dr. Rochayati Basra, M.Pd.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196810312001122001


Dr. Robert Simbolon, MPA
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196408281985031012

Mengetahui:
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamonggotajaan dan Manajemen Kepemimpinan


Mohammad Rizat, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

RINGKASAN

Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan merupakan representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan semangat kedaulatan negara sehingga terwujud kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan penghubung internasional. Indonesia memiliki hubungan batas darat secara langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Dalam pengelolaan batas negara wilayah darat terdapat berbagai isu strategis yang menjadi perhatian sekaligus tantangan kedepan.

Beberapa kondisi yang dihadapi dan menjadi isu strategis pada aspek pengelolaan Batas Wilayah Negara antara lain belum selesainya penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen, belum maksimalnya pengawasan dan pemeliharaan tanda batas negara, keadaan dan strategi politik negara tetangga untuk menyelesaikan perundingan, dan masih adanya potensi kerentangan dan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme pada masyarakat perbatasan.

Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan rencana induk, rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.

Untuk Peningkatan peran masyarakat perbatasan dalam menjaga kedaulatan dan pengamanan batas wilayah negara secara maksimal menjadi unggulan dari proyek perubahan ini, maka keasdepan pengelolaan batas negara wilayah darat dapat melakukan pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam menjaga pertahanan keamanan melalui penjagaan pilar batas negara.

PRAKATA

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, laporan pelaksanaan proyek perubahan yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara”** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir peserta Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022. Proyek perubahan ini dirancang sebagai ajang latihan dan implementasi teori-teori yang disampaikan selama pembelajaran. Diharapkan dari pelaksanaan proyek perubahan ini, didapatkan hasil yang berkontribusi secara nyata terhadap kemajuan organisasi, khususnya pada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP RI).

Kami ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Robert Simbolon, MPA – Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Negara (BNPP) RI - selaku mentor dan Bapak Drs. Machmudan Sadik, M.Si selaku coach dari proyek perubahan ini. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Widyaiswara atas arahan, pendampingan dan dukungannya, dan para Fasilitator atas masukannya dan kerjasamanya, para rekan-rekan peserta PKN II Angkatan XXVIII 2022 atas kekompakannya.

Kami berharap bahwa proyek perubahan yang dilakukan ini dapat membawa perubahan organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ke arah yang lebih baik dan terus berdaya saing secara nasional dan global.

Jakarta, Desember 2022



Drs. Ismawan Harijono, M.Si

DAFTAR ISI

COVER	i
FORM PERSETUJUAN MENTOR.....	i
FORMULIR PERSETUJUAN COACH.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
BERITA ACARA	iv
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN	11
C. OUTPUT DAN OUTCOME	13
D. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS	14
E. RENCANA STRATEGI MARKETING	21
F. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA.....	25
G. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN	28
H. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN.....	31
I. RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI SEBAGAI TINDAKLANJUT DARI SELF ASSESMENT DIRI	34
BAB II PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	36
A. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS.....	36
B. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING	55
C. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR	56
BAB III PENUTUP	58
A. <i>LESSON LEARNT</i>	58
B. KESIMPULAN	58
C. SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60

LAMPIRAN	64
----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi BNPP	2
Gambar 2. Peta Perbatasan RI	10
Gambar 3. Alur Pikir	11
Gambar 4 Analisis Masalah Fishbone Diagram	15
Gambar 5. Grafik Analisis SWOT	18
Gambar 6. Tahapan-tahapan yang terencana dengan target yang jelas dan terukur	21
Gambar 7. Tabel Analisa Stakeholder.....	23
Gambar 8. Rencana Strategis Marketing	25
Gambar 9. Tata Kelola Proyek Perubahan.....	33
Gambar 10. Bagan Rencana Pengembangan Potensi Diri	35
Gambar 11. Undangan Rapat Internal Pembentukan Tim Efektif	37
Gambar 12. Daftar Hadir Rapat	38
Gambar 13. Dokumentasi Rapat.....	38
Gambar 14. Notulensi Rapat.....	39
Gambar 15. SK Tim Efektif.....	39
Gambar 16. Undangan Rapat	40
Gambar 17. Dokumentasi Rapat Tim Efektif	40
Gambar 18. Rencana Aksi Pelaksanaan Proyek Perubahan	40
Gambar 19. Undangan Rapat dengan mitra K/L	41
Gambar 20. Daftar Hadir Rapat	42
Gambar 21. Dokumentasi	42
Gambar 22. Notulensi	43
Gambar 23. Undangan Rapat dengan Pemerintah Daerah	43
Gambar 24. Daftar Hadir Rapat	44
Gambar 25. Dokumentasi	44
Gambar 26. Notulensi	45
Gambar 27. Undangan Rapat dengan Mitra K/L	46
Gambar 28. Daftar Hadir Rapat	47
Gambar 29. Dokumentasi	47
Gambar 30. Notulensi	48
Gambar 31. Undangan Rapat dengan Stakeholder	49
Gambar 32. Daftar Hadir Rapat	49
Gambar 33. Dokumentasi	50
Gambar 34. Notulensi	50
Gambar 35. Modul.....	50
Gambar 36. Undangan Rapat Internal	51
Gambar 37. Daftar Hadir Rapat	52
Gambar 38. Dokumentasi	52
Gambar 39. Notulensi	53
Gambar 40. Dokumentasi Tim Aju	53
Gambar 41. Notulensi Tim Aju	54
Gambar 42. Surat Pemberitahuan dan Pemanggilan Peserta	54
Gambar 43. Nota Dinas.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis SWOT	17
Tabel 2. Skala Prioritas	26
Tabel 3. Analisis Risiko	26
Tabel 4. Daftar Tim Efektif.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Undangan Rapat Internal Pembentukan Tim Efektif	64
Lampiran 2. Daftar Hadir Rapat	65
Lampiran 3. Dokumentasi Rapat.....	66
Lampiran 4. Notulensi Rapat.....	67
Lampiran 5. SK Tim Efektif.....	68
Lampiran 6. Undangan Rapat Pembahasan Rencana Aksi Proyek Perubahan.....	69
Lampiran 7. Dokumentasi Rapat Tim Efektif	70
Lampiran 8. Rencana Aksi Pelaksanaan Proyek Perubahan	71
Lampiran 9. Undangan Rapat Koordinasi dengan mitra K/L	72
Lampiran 10. Daftar Hadir Rapat Koordinasi dengan Mitra K/L	74
Lampiran 11. Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Mitra K/L.....	75
Lampiran 12. Notulensi Rapat Koordinasi dengan mitra K/L.....	76
Lampiran 13. Undangan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sambas	78
Lampiran 14. Daftar Hadir Rapat Koordinasi dengan Pemerintah kabupaten Sambas	80
Lampiran 15. Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sambas.....	81
Lampiran 16. Notulensi Rapat Koordinasi dengan Kabupaten Sambas.....	82
Lampiran 17. Undangan Rapat Penyusunan Modul dengan Mitra K/L	84
Lampiran 18. Daftar Hadir Rapat Penyusunan Modul dengan Mitra K/L.....	86
Lampiran 19. Dokumentasi Penyusunan Modul dengan mitra K/L.....	87
Lampiran 20. Notulensi Rapat Penyusunan Modul dengan Mitra K/L	88
Lampiran 21. Undangan Rappat Penyusunan Modul dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	91
Lampiran 22. Daftar Hadir Rapat Penyusunan Modul Kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.....	92
Lampiran 23. Dokumentasi Rapat Koordinasi Penyusunan Modul dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.....	93
Lampiran 24. Notulensi Rapat Penyusunan Modul dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	94
Lampiran 25. Modul Panduan Fasilitator.....	97
Lampiran 26. Modul Himpunan Materi	98
Lampiran 27. Modul Petunjuk Pelaksanaan Bimtek	99
Lampiran 28. Surat Undangan Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Pilot Project	100
Lampiran 29. Daftar Hadir Pelaksanaa Rapat Internal.....	101
Lampiran 30. Dokumentasi Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	102
Lampiran 31. Notulensi Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	103
Lampiran 32. Dokumentasi Tim Aju	104
Lampiran 33. Notulensi Tim Aju	106

Lampiran 34. Surat Pemberitahuan dan Pemanggilan Peserta	108
Lampiran 35. Nota Dinas Pelaksanaan Pilot Project.....	110

BAB I

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) merupakan badan koordinasi pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan yang beranggota 27 K/L dan 15 Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan negara. BNPP dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. BNPP mempunyai tugas:

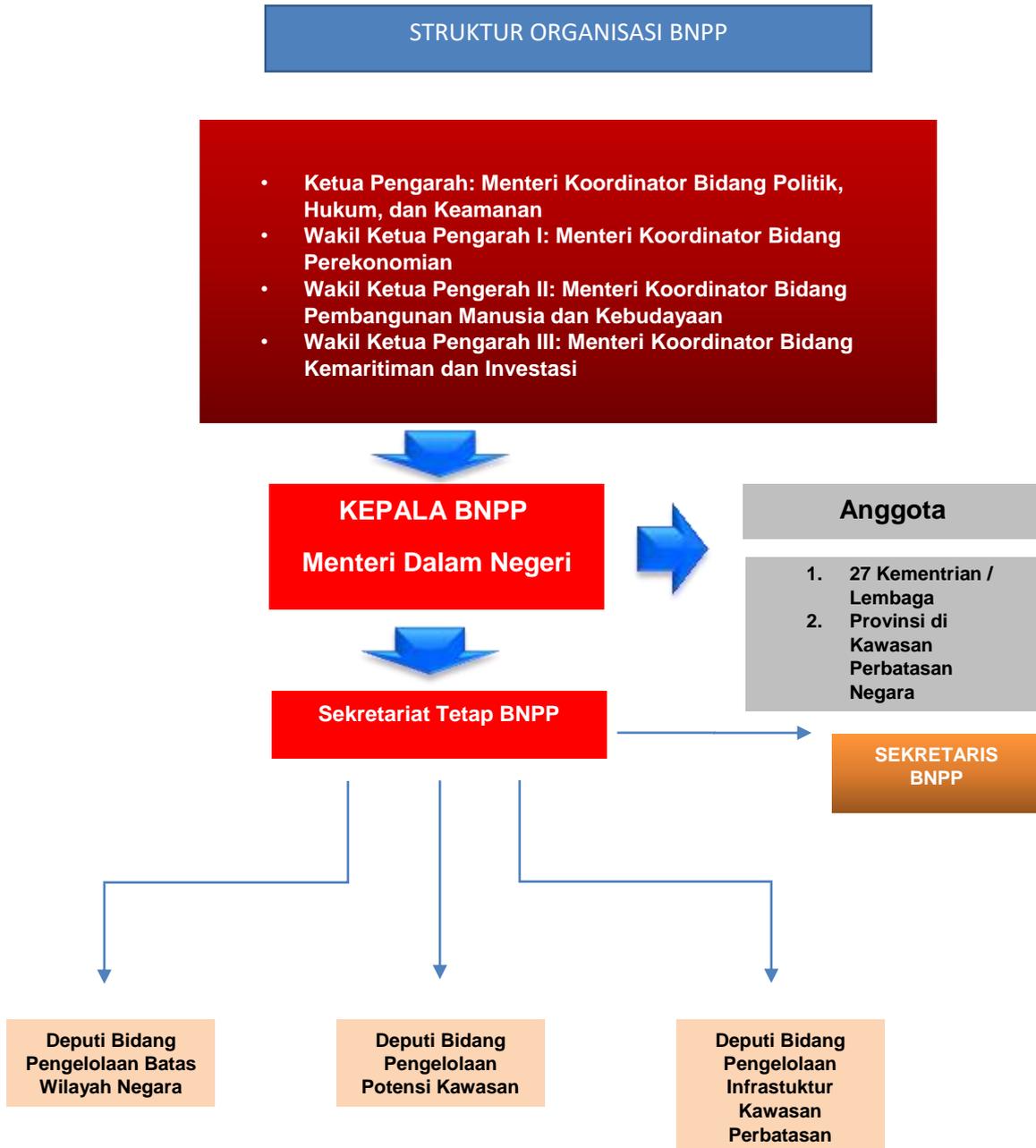
1. Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan
2. Menetapkan rencana anggaran
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan
4. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 Pasal 1 angka 5 jo dan Pasal 10, pada tingkat daerah juga terdapat BPPD yakni perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan. Dalam hal penetapan dan penegasan batas wilayah negara dan pengelolaan lintas batas, terdapat lembaga diplomasi lintas batas yang umumnya merupakan lembaga *ad hoc*. Demi tercapainya iklim tata kelola perbatasan, diperlukan satu kesekretariatan yang kuat. Settap BNPP diberi amanah selaku koordinator pengelola perbatasan dan akan menjadi jembatan bagi kementerian/lembaga dalam memberikan saran tata Kelola perbatasan yang akan di akomodasi dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BNPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNPP menyatakan bahwa Settap BNPP terdiri atas:

1. Sekretariat BNPP;
2. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;

3. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan
4. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.



Gambar 1. Bagan Organisasi BNPP

Sekretaris BNPP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris BNPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Fasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan;
2. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan;
4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BNPP;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BNPP.

Sekretariat tetap BNPP dalam melaksanakan tugas di bantu oleh 3 (tiga) Deputi setingkat yaitu:

1. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara
2. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan
3. Deputi Pengelolaan Infrstruktur Kawasan Perbatasan

Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada dasarnya dilakukan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai wilayah yang aman dan tertib dari aspek kedaulatan negara serta keamanan kawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan upaya melalui kebijakan serta strategi pelaksanaan berdasarkan bidang sebagai berikut:

1. Bidang Penetapan Batas Wilayah Negara

- a. Subbidang Batas Wilayah Darat

Kebijakan Subbidang Batas Wilayah Darat diarahkan pada penyelesaian batas negara wilayah darat Indonesia-Malaysia, Indonesia-Timor Leste dan permasalahannya, serta mengoptimalkan penegasan batas Indonesia-Papua Nugini.

Upaya penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat dilakukan melalui perundingan segmen batas negara, serta melaksanakan demarkasi dengan menggunakan tanda batas negara seperti patok/pilar batas negara

yang didukung oleh teknologi informasi geospasial. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) Mengoptimalkan Penyelesaian dan Penegasan Batas Negara Wilayah Darat

a) Batas Wilayah Darat Indonesia-Malaysia

Penyelesaian batas wilayah darat Indonesia-Malaysia masih menyisakan 7 (tujuh) *Outstanding Boundary Problems* (OBP). Untuk Sektor Timur terdapat 3 (tiga) OBP yaitu: (1) Segmen OBP Pulau Sebatik, di lokasi Kecamatan Sebatik Barat, Sebatik Tengah, dan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan; (2) Segmen OBP Sungai Sinapad di lokasi Kecamatan Lumbis Hulu, Desa Kabunglor, Desa Tatagas, dan Desa Limpagas, Kabupaten Nunukan; (3) Segmen OBP B2700-B3100 di lokasi Desa Kabunglor, Desa Tatagas, dan Desa Limpagas, pada Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan. Tahapan untuk melakukan survei bersama ketiga OBP dimaksud telah disepakati kedua negara pada Persidangan *Joint Indonesia-Malaysia* (JIM) tanggal 21 November 2019 di Kuala Lumpur.

Selanjutnya Sektor Barat terdapat 4 (empat) OBP yaitu: (1) Segmen OBP Sungai Buan/Gunung Jagoi di Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; (2) Segmen OBP Gunung Raya di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; (3) Segmen OBP Batu Aum di Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; (4) Segmen OBP Titik D400 di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan batas Republik Indonesia-Malaysia oleh kedua negara dilakukan antara lain melalui JIM yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

b) Batas Wilayah Darat Indonesia-Timor Leste

Terdapat 1 (satu) segmen batas darat yang belum selesai tersurvei (*Unsurveyed Segment*) yaitu batas antara Indonesia dengan Timor Leste pada Segmen Subina-Oben. Pelaksanaan survei direncanakan mulai tahun 2022 pada 4 (empat) lokasi: (1) Segmen Subina di Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; (2) Segmen Pistana di Kecamatan Bikomi

Tengah dan Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; (3) Segmen Haumeniana-Nifonunpo di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; (4) Segmen Tubu-Nilulat di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain itu terdapat 2 (dua) *Unresolved Segment* Indonesia-Timor Leste, yaitu Segmen Noel Besi-Citrana yang direncanakan tindak lanjutnya pada tahun 2022, dan Segmen Manusasi-Bijael Sunan yang direncanakan tindak lanjutnya pada tahun 2023. Pengelolaan batas Indonesia-Timor Leste oleh kedua negara dilakukan antara lain melalui: (1) *Senior Officer Consultation* (SOC) Indonesia-Timor Leste yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan (2) *Joint Border Committee* (JBC) Indonesia-Timor Leste yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

c) Batas Wilayah Darat Indonesia-Papua Nugini.

Penegasan batas wilayah Indonesia-Papua Nugini masih perlu dilakukan dengan perapatan pilar dalam rangka meningkatkan demarkasi. Pengelolaan batas Indonesia-Papua Nugini oleh kedua negara dilakukan antara lain melalui: (1) JBC Indonesia-Papua Nugini dan Sub Komite Teknis Survei Penegasan dan Penetapan Batas Indonesia-Papua Nugini, dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri; (2) *Joint Sub Committee On Security Matters* (JSC-SM) Indonesia-Papua Nugini dikoordinasikan Tentara Nasional Indonesia.

2) Identifikasi, Perbaikan, dan Pemeliharaan Patok/Pilar Batas Negara

Patok/pilar batas merupakan objek batas negara penting yang memerlukan pemeliharaan melalui *investigation*, *refixation*, dan *maintenance*. Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan, disiapkan mekanisme dan sumber daya, seperti dasar hukum dan kebijakan pemeliharaan patok, sumber daya manusia untuk berpatroli, sarana dan prasarana akses menuju patok, dan dukungan teknologi. Selain itu basis data mengenai batas negara secara keruangan (spasial) dalam peta harus disiapkan untuk mempermudah dalam memelihara batas negara.

3) Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengamanan Perbatasan

Partisipasi masyarakat dalam pengamanan perbatasan sesuai Pasal 19 UU Wilayah Negara dilakukan melalui fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan di perbatasan negara sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan. Partisipasi masyarakat tersebut merupakan Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta dan sinergitas antara tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah pusat dalam pertahanan dan keamanan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pemberian pemahaman berupa kebijakan pengelolaan Batas Wilayah Negara, kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan batas negara wilayah darat, pengamanan terpadu, peran pemerintahan desa dan kelembagaan desa dalam mendukung keamanan dan ketertiban wilayah, menjaga dan memelihara patok/pilar batas negara, kunjungan lapangan, dan Rencana Kerja Tindak Lanjut.

4) Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Geospasial untuk Pengamanan Patok Batas Negara

Pemeliharaan dan pengamanan patok batas negara di perbatasan darat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi geospasial. Beberapa pemanfaatan teknologi yang akan digunakan antara lain: Satelit Penginderaan Jauh, *Unmanned Aerial Vehicles and Unmanned Aircraft Systems*, dan Tapal Batas *Reference*.

2. Bidang Pertahanan Wilayah Negara

a. Subbidang Pertahanan Wilayah Darat

Kebijakan pengelolaan pertahanan di perbatasan wilayah darat diarahkan pada peningkatan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta sesuai Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang didukung dengan teknologi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pertahanan di Batas Wilayah Negara dari berbagai ancaman dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan memanfaatkan perkembangan teknologi di bidang pertahanan. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sistem Pertahanan Berbasis Teknologi di Kawasan Perbatasan

Peningkatan sistem pertahanan dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Termasuk di dalamnya adalah mengembangkan peranti keras dan peranti lunak yang akan menghasilkan informasi geospasial guna mendukung fungsi pengawasan, pemantauan, pengamanan, dan pelaporan terhadap kondisi dan posisi patok/pilar batas negara, yang diharapkan ke depannya dapat memberikan informasi berupa data secara waktu nyata (*real time data*).

2) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertahanan

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara, termasuk di wilayah perbatasan. Peningkatan sumber daya manusia pertahanan untuk menghadapi berbagai ancaman di wilayah perbatasan dilakukan melalui penyiapan kapasitas sumber daya manusia yang handal dalam pembuatan kebijakan pertahanan serta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, penguasaan teknologi, dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang pertahanan untuk menjaga perbatasan negara.

3. Bidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah

a. Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Darat

Kebijakan Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Darat diarahkan pada upaya peningkatan ketertiban masyarakat dan pengurangan potensi aktivitas kriminal lintas negara. Skema pertahanan dan keamanan dipertegas dengan membedakan antara aktivitas yang mengancam kedaulatan wilayah negara dan aktivitas yang bersifat kriminal murni yang terdapat aspek kemanusiaan di dalamnya. Keamanan dan ketertiban wilayah darat dilakukan dengan meningkatkan ketertiban masyarakat dan pengurangan potensi aktivitas kriminal lintas negara. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) meningkatkan kewaspadaan dan menegakkan hukum terhadap aktivitas ilegal di Kawasan Perbatasan darat;
- 2) meningkatkan kewaspadaan dan optimalisasi penanggulangan terorisme dan paham radikal pada masyarakat di perbatasan;

- 3) meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap transformasi sosial, ekonomi serta teknologi virtual yang dipengaruhi negara lain.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan diatas, hal-hal yang menjadi pertimbangan perlunya adanya proyek perubahan ini pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dirumuskan sebagai berikut:

1. Urgensi

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara;
- b. Koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- c. Koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas; dan
- d. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara.

1) Kondisi Saat Ini

- a) Minimnya jumlah personil pamtas yang bertugas sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara
- b) Minimnya pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman masyarakat desa terdepan perbatasan negara terkait pengamanan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara
- c) Belum adanya regulasi terkait pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di desa yang berada di garis terdepan negara

2) Kondisi yang Diharapkan

- a) Keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara pilar dan tanda batas negara wilayah darat.

- b) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terdepan tentang pentingnya pengamanan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara.
- c) Tersusunnya Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Negara Dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara.

2. Penelitian Kepustakaan

Berdasarkan konsepsi hukum internasional, cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah seluruh wilayah yang diwarisi dari penjajah Belanda, sesuai dengan prinsip hukum *Uti Possidetis Juris*, yang artinya bahwa suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya. Batas wilayah Negara Indonesia dengan negara tetangga tersebar di 10 kawasan, baik di darat maupun di laut. Kawasan perbatasan darat tersebar di 3 (tiga) kawasan, yaitu : (1) Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan, (2) Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG di Papua, dan (3) Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur.

Pengelolaan Batas negara dan Kawasan perbatasan mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Berdasarkan UU Wilayah Negara, yang dimaksud dengan Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional, sedangkan Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah besar, Indonesia pun memiliki beberapa negara tetangga, baik yang berbatasan darat maupun berbatasan laut. Secara wilayah, Indonesia berbatasan darat dengan 3 negara dan berbatasan laut dengan 10 negara. Di wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia.

Peta Perbatasan RI



Gambar 2. Peta Perbatasan RI

Isu-isu strategis yang mendasari berbagai permasalahan tersebut dapat terbagi menjadi 4 (empat) dimensi, meliputi (1) Dimensi Kelembagaan, (2) Dimensi pengelolaan Batas Wilayah Negara, (3) Dimensi Pengelolaan Lintas Batas, dan (4) Dimensi Pembangunan Kawasan Perbatasan. Terkait aspek penetapan dan penegasan batas negara, isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah proses penyelesaian dan penyepakatan batas dengan negara tetangga yang belum selesai, yaitu;

- a. Belum optimalnya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas;
- b. Belum optimalnya aspek pengawasan terhadap tanda batas;
- c. Belum optimalnya peran kelembagaan pengelolaan batas negara dalam upaya penetapan dan penegasan batas negara;
- d. Belum optimalnya upaya pengawasan dalam rangka peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum di batas wilayah negara;
- e. Maraknya kegiatan ilegal di kawasan perbatasan akibat lemahnya pengawasan pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan darat;
- f. Belum optimalnya upaya pengawasan di kawasan perbatasan akibat rendahnya dukungan sarana prasarana dan teknologi pengawasan pertahanan keamanan dan penegakan hukum, serta belum terkoordinasinya sistem pengamanan perbatasan terpadu antara *stakeholder* terkait.

3. Alur Pikir

Rancangan proyek perubahan ini disusun terstruktur berdasarkan alur pikir penulis yang tergambar dalam gambar di bawah ini



Gambar 3. Alur Pikir

B. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

1. Tujuan

Untuk meningkatkan peran pemerintah desa dan masyarakat perbatasan dalam menjaga kedaulatan dan pengamanan batas wilayah negara secara maksimal menjadi unggulan dari proyek perubahan ini, maka keasdepan pengelolaan batas negara wilayah darat harus memiliki tujuan yang sesuai dengan arah dan orientasi organisasi adaptif yang sudah ditetapkan, yaitu:

a. Jangka Pendek (60 hari)

- 1) Melaksanakan dukungan kesekretariatan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan dalam Rangka Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Negara;
- 2) Menyusun rencana aksi program pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara;
- 3) Meningkatkan kerjasama antara K/L dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Perbatasan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan dalam rangka Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Negara;

- 4) Tersedianya Bahan Pembelajaran dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam rangka Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Negara;
- 5) Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai bagian dari sistem hankam.

b. Jangka Menengah (6 bulan)

- 1) Penyusunan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Negara dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Negara;
- 2) Penguatan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara;
- 3) Keikutsertaan masyarakat Desa Terdepan perbatasan negara dalam menjaga dan memelihara tanda batas negara.

c. Jangka Panjang (1 tahun)

- 1) Meningkatkan peran dan fungsi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam pertahanan dan keamanan garis batas melalui pengamanan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
- 2) Terbentuknya organisasi masyarakat menjaga perbatasan (Mentas);
- 3) Terwujudnya Indonesia maju, berdaulat dan mandiri di perbatasan negara.

2. Manfaat

Tercapainya seluruh tujuan dari proyek perubahan ini akan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung secara internal maupun eksternal bagi organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan masyarakat perbatasan baik secara internal maupun eksternal sebagai berikut:

Internal:

- Meningkatkan keamanan dan terpeliharanya tanda batas wilayah negara pada desa perbatasan negara sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan
- Tersedianya data yang akurat untuk kebutuhan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan penguatan kelembagaan

Eksternal:

- Meningkatnya keterlibatan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan rakyat Semesta
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam memelihara tanda batas wilayah negara

C. OUTPUT DAN OUTCOME**1. Output**

Output yang ingin dihasilkan dari proyek perubahan ini terbagi menjadi output jangka pendek (60 hari), jangka menengah (6 bulan), dan panjang (1 tahun) antara lain:

a. Jangka Pendek (60 hari)

- 1) Tersedianya Surat Keputusan Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat tentang Tim Efektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Rangka Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Negara Membuat Naskah Dinas;
- 2) Meningkatkan networking dan kerjasama dengan mitra K/L terkait dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Perbatasan Menyusun modul pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara;
- 3) Menyusun modul pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara;
- 4) Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project*;

b. Jangka Menengah (6 bulan)

- 1) Merumuskan Peraturan Badan guna mempercepat program pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara
- 2) Memfasilitasi kegiatan ToT Pejabat Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara;
- 3) Memberikan pelatihan di Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara;
- 4) Membentuk organisasi kemasyarakatan penjaga perbatasan yang merupakan kolaborasi antara satuan pengaman perbatasan (pamtas) dan masyarakat desa terdepan perbatasan negara.

c. Jangka Panjang

- 1) Mendayagunakan masyarakat menjaga Perbatasan (Mentas) sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi program pengamanan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara sebagai bagian dari sistem hankam.

2. Outcome

Dari berbagai *output* yang didapatkan akan menghasilkan dampak dan manfaat yang diharapkan berupa peningkatan keterlibatan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam pengamanan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara. *Outcome* yang dihasilkan dari proyek perubahan ini yaitu:

- a. Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam menjaga kedaulatan dan pengamanan batas wilayah negara secara maksimal
- b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam pengamanan dan memelihara tanda batas wilayah negara wilayah darat
- c. Terciptanya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam menjaga perbatasan

D. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

1. Analisa Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis yang digunakan pada proyek perubahan ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode analisa yaitu menggunakan analisis *fishbone* dan SWOT.

a. Analisis Fishbone

Teknik analisis fishbone adalah alat penemuan sebab-akibat yang membantu mencari tahu berbagai alasan terjadinya kegagalan atau kerusakan dalam suatu proses. Tahapan dalam menganalisis permasalahan dengan menggunakan teknik analisis fishbone yaitu:

- 1) Mengidentifikasi masalah, dalam rancangan proyek perubahan ini yang menjadi masalah strategis adalah “Minimnya keterlibatan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam menjaga dan memelihara tanda batas negara”.

2) Mengidentifikasi kategori-kategori dari permasalahan, yang dijabarkan sebagai berikut:

a) MAN

- Minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengamanan dan pemeliharaan pilar batas
- Keterbatasan aparat TNI penjaga perbatasan (Pamtas) dibandingkan luas dan jangkuan yang harus dijaga

b) MONEY

- Keterbatasan anggaran dari APBN maupun APBD
- Keterbatasan permodalan

c) MATERIAL

- Stigma pengamanan dan pemeliharaan tanda batas merupakan tugas dari pemerintah pusat

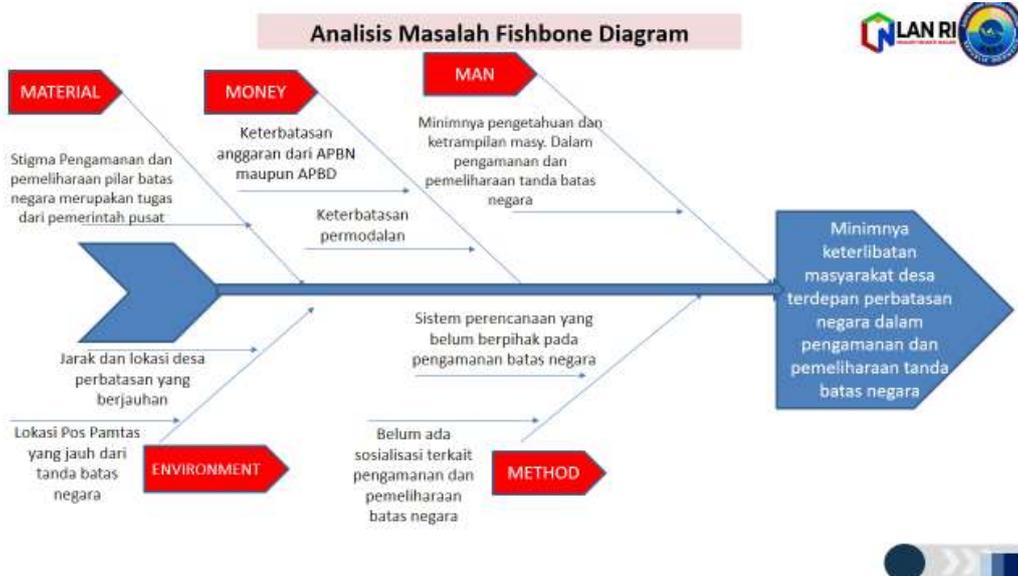
d) METHOD

- Sistem perencanaan yang belum berpihak pada pengamanan batas negara
- Belum ada sosialisasi terkait pengamanan dan pemeliharaan batas negara

e) ENVIROMENT

- Jarak dan lokasi desa perbatasan yang berjauhan
- Minimnya sarpras infrastruktur fisik, ekonomi dan telkomunikasi

b. Menganalisis dan menyusun diagram fishbone



Gambar 4 Analisis Masalah Fishbone Diagram

Berdasarkan analisis fishbone diatas didapatkan permasalahan utama berupa minimnya keterlibatan masyarakat terdepan perbatasan negara dalam pengamanan dan pemeliharaan tanda batas negara. Untuk mendapatkan strategi utama dalam penyelesaian masalah utama digunakan metode SWOT dengan memetakan permasalahan yang ada kedalam kategori *Weakness* dan *Threats*. Pada aspek *material*, *man* dan *environment* masuk kedalam kategori *Weakness*. Aspek *Money* dan *Method* masuk kedalam kategori *Threats*. Pemilihan strategi utama dilanjutkan dengan metode SWOT.

c. Anallisis SWOT

Dari analisis diagram *fishbone* tersebut didapatkan penyebab dari permasalahan utama untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah salah satu analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), *Threats* (ancaman) yang dapat di uraikan sebagai berikut:

1) *Strengths* (kekuatan)

- UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- BNPP di dukung dengan 27 Kementerian/Lembaga, 15 Gubernur dan 48 Kabupaten/kota
- UU No. 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem yang bersifat semesta dan melibatkan seluruh warga negara

2) *Weakness* (kelemahan)

- Minimnya anggaran yang tersedia
- Stigma Pengamanan dan pemeliharaan pilar batas negara merupakan tugas dari pemerintah pusat
- Belum adanya regulasi terkait pemberdayaan masyarakat desa terdepan batas negara

3) *Opportunities* (Peluang)

- Sumber daya Manusia yang militan
- Terkoordinasinya elemen stakeholder

4) *Threats* (ancaman)

- Hilang dan rusak serta bergesernya tanda batas negara yang merupakan simbol dari kedaulatan negara
- Lokasi Pos Pamtas yang jauh dari tanda batas negara

Untuk menentukan strategi mana yang harus diimplementasikan dilakukan analisis kuantitatif terhadap faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal. Hasil analisis untuk masing – masing sumber (internal dan eksternal) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Analisis SWOT

STRENGTHS	TINGKAT SIGNIFIKAN	BOBOT	RATING	SKOR
Undang Undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara	3	0.33	5	1.67
BNPP didukung oleh 27 Kementerian /Lembaga dan 15 Gubernur	3	0.33	4	1.33
UU no 3 tahun 2002 tentang Pasal 1 ayat 2, Sistem pertahanan negara adalah sistem yang bersifat semesta yg melibatkan seluruh warga negara	3	0.33	4.5	1.50
	9	1.00		4.50
WEAKNESS	TINGKAT SIGNIFIKAN	BOBOT	RATING	SKOR
Minimnya anggaran yang tersedia	2.5	0.29	2	0.59
Stigma Pengamanan dan pemeliharaan pilar batas negara merupakan tugas dari pemerintah pusat	3	0.35	2.5	0.88
Belum adanya regulasi terkait dengan pemberdayaan Masyarakat desa terdepan perbatasan negara	3	0.35	2.5	0.88
	8.5	1.00		2.35
OPPORTUNITIES	TINGKAT SIGNIFIKAN	BOBOT	RATING	SKOR
Sumber daya Manusia yang militan	2.5	0.56	4	2.22
Terkoordinasinya elemen stakeholder	2	0.44	3	1.33
	4.5	1.00		3.56
THREATS	TINGKAT SIGNIFIKAN	BOBOT	RATING	SKOR
Hilang dan rusak serta bergesernya tanda batas negara yang merupakan simbol dari kedaulatan negara	3	0.50	1.5	0.75
Lokasi Pos Pamtas yang jauh dari tanda batas negara	3	0.50	1	0.50
	6	1.00		1.25

Pada tabel tersebut bobot diberikan berdasarkan prioritas pada skala 0 sampai 1 (dari yang tidak sampai dengan prioritas utama), sedangkan rating diberikan berdasarkan tingkat pengaruh/pentingnya masing – masing faktor terhadap permasalahan yang diangkat, dengan skala 1

sampai 5 (dari pengaruh terlemah sampai dengan terkuat). Hasil perhitungan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

1) Faktor Internal (S-W) *Strengths* dan *Weakness*

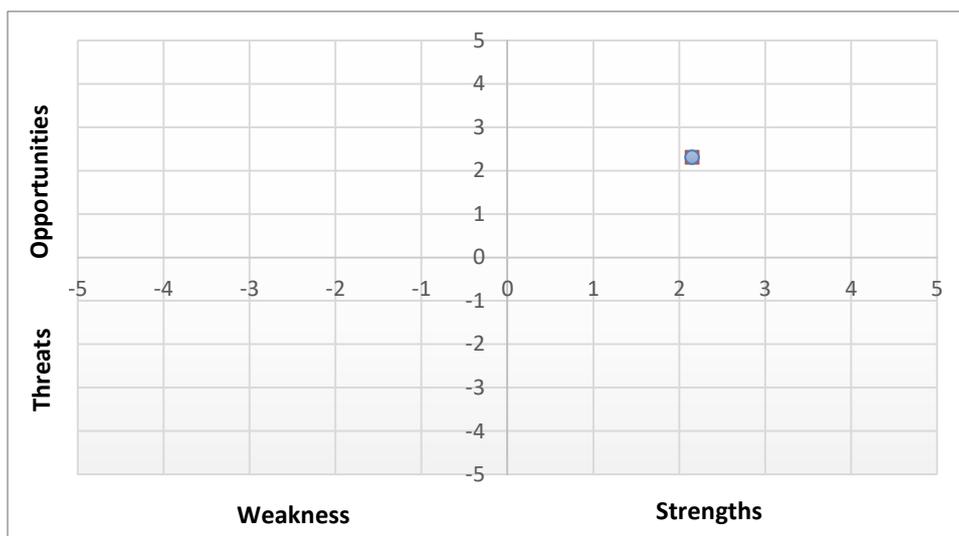
Perhitungan analisis factor internal berupa pengurangan antara skor *Strength* dengan skor *Weakness* menghasilkan nilai positif (2,15).

Maka permasalahan yang diangkat memiliki kekuatan yang relatif lebih besar daripada kelemahannya.

2) Faktor Eksternal (O-T) *Opportunities* dan *Threats*

Perhitungan analisis factor eksternal berupa pengurangan antara skor *Opportunities* dan *Threats* bernilai positif (2,31).

Sehingga dapat disimpulkan permasalahan yang ada mempunyai peluang yang lebih besar dari ancaman.



Gambar 5. Grafik Analisis SWOT

Dengan mempertimbangkan analisis faktor internal dan eksternal tersebut maka permasalahan yang ada berada pada posisi kuadran I, dimana strategi yang dikembangkan adalah strategi yang bersifat SO: memanfaatkan peluang dengan mendayagunakan kekuatan/kelebihan yang dimiliki. Strategi pada tipe SO ini akan menjadi prioritas utama strategi penyelesaian.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (*Milestone*)

Untuk menuju organisasi Keasdepan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat yang merupakan unit dari Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah

Negara sebagai unit organisasi perubahan, maka diperlukan tahapan-tahapan yang terencana dengan target yang jelas dan terukur (Gambar 5). Untuk strategi pencapaian jangka pendek selama 60 hari akan dilakukan beberapa hal antara lain;

a. Pembentukan Tim Efektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Rangka Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Negara

Pada tahap awal pelaksanaan proyek perubahan, project leader melakukan pertemuan dalam rangka pembentukan tim efektif. Dalam rapat tersebut selain dilakukan penentuan anggota tim efektif, juga disampaikan penjelasan tentang penyamaan persepsi pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara, penyampaian target pekerjaan, pembagian tugas tim, dan penentuan jadwal pelaksanaan proyek perubahan.

b. Rapat Koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Perbatasan terkait pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara

Pemberdayaan Masyarakat Desa Perbatasan Terdepan Perbatasan dapat terlaksana dengan adanya kolaborasi antara mitra K/L dan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Tahap selanjutnya, akan dilakukan rapat koordinasi dengan mitra K/L terkait dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi antara semua pihak tentang pentingnya menjaga dan memelihara tanda batas negara.

c. Penyusunan modul pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara

Pelaksanaan pemberdayaan dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menjaga dan memelihara tanda batas negara. Sebagai bentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat maka komponen utama yang dibutuhkan adalah modul pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara.

d. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project*

Penguatan keterlibatan masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara tanda batas negara diwujudkan dalam bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *pilot project*. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat memiliki pengetahuan untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara tanda batas negara.

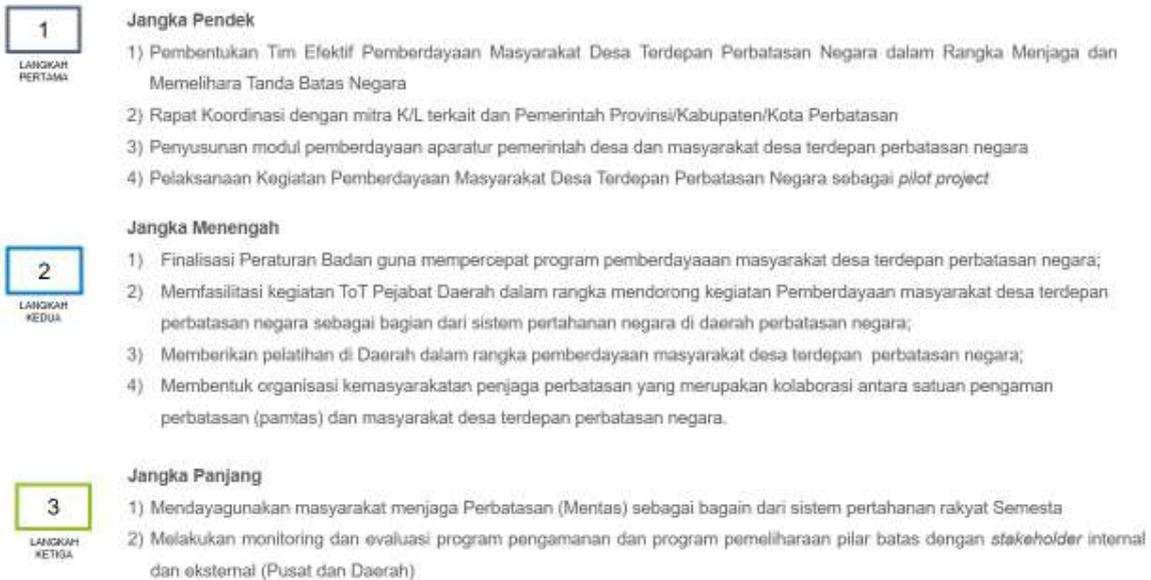
Strategi pencapaian jangka menengah selama 6 bulan akan dilakukan beberapa hal antara lain:

- a. Finalisasi Peraturan Badan guna mempercepat program pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara;
- b. Memfasilitasi kegiatan ToT Pejabat Daerah dalam rangka mendorong kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian dari sistem pertahanan negara di daerah perbatasan negara;
- c. Memberikan pelatihan di Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara;
- d. Membentuk organisasi kemasyarakatan penjaga perbatasan yang merupakan kolaborasi antara satuan pengaman perbatasan (pamtas) dan masyarakat desa terdepan perbatasan negara.

Strategi pencapaian jangka panjang selama 1 tahun akan dilakukan beberapa hal antara lain:

- a. Mendayagunakan masyarakat menjaga Perbatasan (Mentas) sebagai bagian dari sistem pertahanan rakyat Semesta;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi program pengamanan dan program pemeliharaan pilar batas dengan *stakeholder* internal dan eksternal (Pusat dan Daerah).





Gambar 6. Tahapan-tahapan yang terencana dengan target yang jelas dan terukur

3. Identifikasi Stakeholder

Pada proyek perubahan ini juga melibatkan beberapa *stakeholder* untuk mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara. Untuk dapat menjalankan kegiatan Proyek Perubahan ini, tim tidak mungkin bekerja sendiri. *Stakeholder* pada Proyek Perubahan ini adalah :

a. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

BNPP merupakan badan yang berfokus dalam mengelola perbatasan negara dan kawasan perbatasan. Dalam hal ini BNPP memiliki peran yang sangat penting sebagai perencana dan pelaksana kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan sebagai bagian dari sistem Hankam.

b. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Pada kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan, Kemendagri sebagai bagian yang menangani perjanjian batas wilayah negara. Peran Kemendagri dalam kegiatan ini adalah sebagai pembuat regulasi.

c. Pemerintah Daerah

Pada Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dalam

pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Daerah juga berperan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat baik dari segi regulasi maupun dalam hal penyediaan anggaran.

d. Mabes TNI

TNI merupakan kekuatan utama dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Pada kegiatan ini TNI berperan sebagai pengarah kegiatan dan tokoh utama dalam menjaga dan memelihara tanda batas wilayah negara.

e. Kementerian Keuangan dan Bappenas

Kementerian Keuangan dan Bappenas merupakan *stakeholder* yang memiliki peran terpenting dalam perencanaan dan program kegiatan dan Anggaran bagi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai bagian sistem Hankam. Kegiatan K/L baik pusat maupun daerah akan sangat bergantung dari persetujuan perencanaan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.

f. Ditjen Bina Pemdes

Ditjen Bina Pemdes memiliki peran yang cukup penting dalam Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan. Sebagai salah satu bagian yang fokus dalam menangani desa, Ditjen Bina Pemdes dapat menyediakan regulasi serta anggaran pada kegiatan ini.

g. Masyarakat Perbatasan

Masyarakat perbatasan merupakan tokoh utama dalam Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan. Masyarakat merupakan kekuatan pendukung dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

4. Jenis-jenis Stakeholder

Kontribusi dari *stakeholder* merupakan kunci penting dalam keberhasilan suatu kegiatan. Mengidentifikasi jenis-jenis *stakeholders* itu sangat penting bagi organisasi publik yang mengharapkan adanya perubahan dan peningkatan kinerja organisasi. Jenis-jenis *stakeholder* terbagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- a. Promoters memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkannya)

- b. Defenders memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan
- c. Latents tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik
- d. Apathetics kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan

5. Analisa Stakeholder

Berdasarkan hasil pengkajian pengaruh dan prioritas, *stakeholder* dapat dipetakan seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 7. Tabel Analisa Stakeholder

6. Strategi Komunikasi/Mobilisasi Stakeholder

Strategi komunikasi stakeholder berdasarkan hasil analisis stakeholder dijabarkan sebagai berikut :

a. Komunikasi yang dibangun dengan stakeholders Key Player (Promoters)

Komunikasi yang perlu dibangun *stakeholders* dengan Promoters adalah :

- 1) Komunikasi yang konsisten dan tetap berkomitmen walaupun situasi berubah;
- 2) Komunikasi langsung, harus dapat merespons pertanyaan secara langsung;
- 3) Harus dimonitor terus menerus;
- 4) Komunikasi yang memungkinkan stakeholders dapat bertanya kapanpun dan dapat menyediakan jawaban;
- 5) Memahami masalah yang timbul dan dapat memberi respon dengan cepat.

b. Komunikasi dengan Defendents Stakeholders

Komunikasi dengan *stakeholders defendents* :

- 1) Susun Strategi komunikasi bersama dengan stakeholders ini (When, What Means, Why, Who);
- 2) Gunakan software manajemen yang memberikan laporan;
- 3) Laporkan status proyek ringkas dan rinci. Anda harus membuat laporan status setidaknya setiap dua minggu dan didistribusikan di antara para stakeholders;
- 4) Anda perlu berusaha untuk bertemu *stakeholders* selama proses manajemen proyek. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi telah dibaca, baik melalui update email atau melalui laporan status;
- 5) Yang paling penting, Anda harus berbicara dengan stakeholders untuk mengetahui apa yang mereka harapkan dari Anda.

c. Komunikasi dengan (Latent) Stakeholders

Stakeholder dalam kategori ini bisa jadi pengaruh yang kuat, tetapi karena mereka berpotensi memiliki kepentingan rendah, anda perlu menemukan saluran digital yang sesuai untuk menargetkan pesan mereka. Dengan cara ini mereka dapat memberikan konteks dan mengatasi isu-isu spesifik yang menarik minat stakeholders, sehingga membangun dukungan politik untuk proyek tersebut.

d. Komunikasi dengan (Apethetics) Stakeholders

Komunikasi dengan *stakeholders apethetics* :

- 1) Mengelola hubungan pasif, tidak perlu mencari mereka, Tetap sopan dan bersikap sewajarnya ketika bertemu;

- 2) Berhati-hatilah tentang peristiwa yang tiba-tiba bisa memindahkan mereka ke Key Players;
- 3) Gunakan metode push communication – tidak ada interaksi kecuali diminta.

7. Strategi Marketing Proyek Perubahan

Hasil analisis strategi *marketing* dengan metode 4P1C (*product, place, price, promotion, dan customer*) menunjukkan bahwa *customer* adalah unsur utama dari proyek perubahan ini. *Customer* terdiri dari masyarakat desa terdepan perbatasan negara (Aparatur Pemerintah Desa, Pamtas, Linmas, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan cendekiawan) sesuai dengan (Gambar 7).

Product	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan Masyarakat desa terdepan perbatasan sebagai sistem pertahanan rakyat semesta
Price	<ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi perencanaan anggaran antara K/L dan Pemerintah Daerah
Promotion	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Campaign</i> dalam semua media yang dimiliki oleh BNPP group wa Facebook, instagam dll secara masif dan berkelanjutan
Place	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor BNPP, Pemda Kabupaten Perbatasan
Customer	<ul style="list-style-type: none"> • Aparatur Pemerintah Desa, Pamtas, Linmas, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan cendekiawan

Gambar 8. Rencana Strategis Marketing

F. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA

Hal yang paling mendasar di dalam implementasi suatu proyek perubahan adalah menyusun dan merencanakan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu dokumen perencanaan yang digunakan oleh manajer proyek perubahan untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan, memperkirakan dampak dari setiap tahapan di dalam proyek perubahan, probabilitas yang mungkin terjadi dari setiap langkah yang diambil, dan kemudian mendefinisikan

tanggapan atau respon terhadap risiko-risiko yang sudah diidentifikasi. Risiko yang teridentifikasi dapat berupa ketidakpastian dalam lingkup jadwal pelaksanaan, biaya yang mendukung pelaksanaan, atau kualitas dari sumber daya. Oleh karena itu, rencana manajemen risiko ini dibuat untuk mengidentifikasi risiko-risiko, prioritas, dan menciptakan langkah-langkah atau sistem untuk memaksimalkan potensi yang berdampak positif dan mengurangi potensi yang berdampak negatif. Selain mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul, diidentifikasi juga probabilitas terjadinya risiko, dampak yang ditimbulkan, dan rencana tindakan mitigasi risiko (Tabel 1), serta prioritas mana yang harus segera didahulukan di dalam pelaksanaan proyek perubahan (Gambar 5).

Tabel 2. Skala Prioritas

Skala Prioritas	Mendesak	Kurang mendesak
Penting	1	2
Kurang Penting	3	4

Tabel 2 adalah analisis risiko yang menggambarkan identifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dari tahapan pelaksanaan proyek perubahan dan konsekuensinya, probabilitas munculnya risiko dan dampaknya, skala prioritas dan rencana tindakan yang akan dilakukan, serta penanggungjawab pelaksanaan rencana mitigasi.

Tabel 3. Analisis Risiko

No	Risiko	Konsekuensi	Probabilitas	Dampak	Prioritas	Rencana Tindak Mitigasi	Tanggung jawab
1	Penolakan atau resistensi dari tim efektif yang kurang setuju dengan adanya tambahan beban kerja	Perlu dilakukan komunikasi internal dengan tim efektif	Tinggi	Tinggi	1	Melakukan rapat koordinasi dengan tim efektif secara rutin	Asdep
2	Penolakan atau resistensi dari mitra K/L dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Perbatasan untuk melakukan	Perlu dilakukan komunikasi eksternal dengan mitra K/L dan Pemerintah	Tinggi	Tinggi	1	Secara intensif melakukan rapat koordinasi guna menginisiasi adanya	Asdep

No	Risiko	Konsekuensi	Probabilitas	Dampak	Prioritas	Rencana Tindak Mitigasi	Tanggung jawab
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan dalam rangka Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Negara	Provinsi/Kabupaten/Kota				kerjasama yang terjalin	
3	Adanya perbedaan persepsi antar <i>stakeholder</i> terkait, dalam penyusunan modul pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara	Perlu dilakukan koordinasi antar <i>stakeholder</i>	Tinggi	Tinggi	2	Melakukan rapat koordinasi secara intensif untuk menyamakan persepsi antar <i>stakeholder</i> terkait, dalam penyusunan modul pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara	Asdep
4	Penolakan atau resistensi dari masyarakat untuk menerima materi tentang menjaga dan memelihara tanda batas negara	Perlu dilakukan komunikasi dengan masyarakat	Tinggi	Tinggi	1	Melakukan rapat koordinasi secara intensif dengan kelompok kerja untuk mendorong keterlibatan kelompok kerja dalam menjaga tanda batas negara.	Asdep

G. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN

Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan :

Deskripsi tentang faktor-faktor yang dianggap menjadi kunci bagi keberhasilan pencapaian tujuan proyek perubahan secara tepat waktu dan tepat sasaran, dituangkan dalam tabel berikut:

1. Jangka Pendek

No.	Tahapan dan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Tanggal Kegiatan	Hasil	Faktor Penentu
1.	Pembentukan TIM Efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuk Komitmen bersama - Tersusun SK TIM 	4 -7 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya Tim Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Mentor - Dukungan Tim - Kerjasama dan Hubungan antar personal
2.	Membangun Networking dan kerjasama dengan mitra K/L dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Terbangunnya Komunikasi antar Stakeholder terkait; - Tersusunnya rencana aksi pelaksanaan proyek perubah 	24 Oktober – 2 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi yang intens antar stakeholder terkait - Rencana pelaksanaan proyek perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan mentor - Dukungan Tim - Kerjasama Tim - Keseriusan - Ketersediaan Sumberdaya - Ketersediaan akses informasi - Ketersediaan dana
3.	Penyusunan Modul kegiatan Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Modul Pemberdayaan Masyarakat dalam menjaga dan memelihara tanda batas 	27 Oktober – 1 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Modul Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat dalam menjaga dan memelihara tanda batas negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Mentor - Kerjasama Tim - Ketersediaan Sumber daya; - Ketersediaan akses informasi - Kompetensi tim penyusun

No.	Tahapan dan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Tanggal Kegiatan	Hasil	Faktor Penentu
					- Ketersediaan anggaran
4.	Terlaksananya kegiatan PMD sebagai <i>pilot project</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Keikutsertaan masyarakat perbatasan - Keterlibatan pemerintah daerah prov, kab/kota 	7-25 November 2022	- Terlaksananya kegiatan PMD sebagai <i>Pilot Project</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Mentor - Dukungan mentor - Kerjasama Tim - Kerjasama stakeholder - Keseriusan

2. Jangka Menengah

No.	Tahapan dan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Tanggal Kegiatan	Hasil	Faktor Penentu
1.	Penyusunan Peraturan Badan	- Tersusunnya Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam menjaga dan memelihara tanda batas	6-9 Februari 2023	- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam menjaga dan memelihara tanda batas	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Mentor - Dukungan Tim - Kerjasama dan Hubungan antar personal
2.	Fasilitasi ToT Pejabat Daerah	- Terbangunnya pemahaman Pejabat Daerah tentang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara	20-23 Februari 2023	- Adanya dukungan dan komunikasi yang intens dari Pejabat Daerah dalam pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan mentor - Dukungan Tim - Kerjasama Tim - Keseriusan - Ketersediaan Sumberdaya - Ketersediaan akses informasi - Ketersediaan dana
3.	Pelaksanaan Pelatihan di Daerah	- Terbangunnya pemahaman Pemerintah Daerah tentang kegiatan	13-17 Maret 2023	- Terlaksananya kegiatan pelatihan di Daerah untuk mendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Mentor - Kerjasama Tim

No.	Tahapan dan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Tanggal Kegiatan	Hasil	Faktor Penentu
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara		Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Sumber daya; - Ketersediaan akses informasi - Kompetensi tim penyusun - Ketersediaan anggaran
4.	Terbentuknya LK Desa Mentas	<ul style="list-style-type: none"> - Keikutsertaan masyarakat perbatasan - Keterlibatan pemerintah daerah prov, kab/kota 		- Adanya keterlibatan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam menjaga Pilar Batas Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Mentor - Kerjasama Tim - Ketersediaan Sumber daya; - Ketersediaan akses informasi - Kompetensi tim penyusun - Ketersediaan anggaran

3. Jangka Panjang

No.	Tahapan dan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Tanggal Kegiatan	Hasil	Faktor Penentu
1.	Mendayagunakan masyarakat menjaga Perbatasan (Mentas) sebagai bagian dari sistem pertahanan rakyat Semesta	- Keterlibatan masyarakat perbatasan	17-21 April 2023	- Adanya kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat terkait pengawasan patok/pilak batas wilayah negara.	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Mentor - Kerjasama Tim - Ketersediaan Sumber daya; - Ketersediaan akses informasi - Kompetensi tim penyusun - Ketersediaan anggaran
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi program	- Adanya catatan hasil	21-25 Agustus 2023	- Catatan Evaluasi Kegiatan	- Dukungan Mentor

		evaluasi kegiatan		Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara	- Dukungan Tim - Kerjasama dan Hubungan antar personal
--	--	-------------------	--	---	---

H. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

1. Pembentukan Tim Kerja

Dalam suatu organisasi diperlukan kinerja tim untuk meningkatkan performa suatu organisasi. Definisi tim menurut Naresh Jain (2009), tim terdiri dari anggota dengan keterampilan yang saling melengkapi dan menghasilkan sinergi melalui upaya yang terkoordinasi yang memungkinkan setiap anggota untuk memaksimalkan kekuatan mereka dan meminimalkan kelemahan mereka. Anggota tim diharapkan mampu belajar untuk saling membantu, mengenali potensi diri mereka, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap orang untuk melampaui keterbasannya. Pada intinya dalam membangun sebuah tim pada akhirnya fokus kepada manusia dan mengelola hubungan dan komunikasi. Sebuah Tim biasanya bekerja dalam waktu tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu bentuk dari tim adalah tim efektif. Larson & LaFasto (1989) menyebutkan apa yang harus dimiliki dari tim efektif antara lain sebagai berikut:

- a. *A clear, elevating goal* : Tujuan menjadi alasan utama dalam membentuk suatu tim efektif. Tujuan ini harus jelas ditetapkan dan setiap anggota dalam tim ini harus mempunyai pemahaman yang sama mengenai maksud dari tujuan ini.
- b. *Result-Driven Structure* : Capaian yang berdasarkan pada tahapan. Setelah tujuan telah ditetapkan, ada tahapan-tahapan (milestone) yang terbagi pada jangka waktu tertentu untuk melihat progress dari tim tersebut bekerja.
- c. *Competent Team Members*: Tim Efektif juga terdiri dari anggota tim yang kompeten sesuai dengan kebutuhan. Tahu siapa akan melakukan apa.
- d. *Unified Commitment*: Komitmen menjadi modal bagi tim efektif agar bekerja sesuai dengan bagiannya sebaik-baiknya.

- e. *Collaborative Trust and Communication*: Kolaborasi atas dasar saling percaya dan komunikasi menjadi irama dalam tim efektif.
- f. *Standards of Excellence*: Setiap anggota tim efektif komitmen untuk bekerja dengan maksimal dan mencapai hasil yang maksimal
- g. *Support and Recognition*: Peranan pimpinan tim efektif dalam mendukung kerja tim dan juga mengapresiasi ketika sudah bekerja dengan baik dan mencapai tujuan.
- h. *Principle Leadership*: Pemimpin akan menjadi pengarah dalam tim yang harus mampu mengelola setiap anggota tim dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan memastikan arah kerja tim menuju tujuan yang ditetapkan.

Pada proyek perubahan ini, dibentuk tim efektif yang akan membantu dalam hal perumusan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan pelaporan kegiatan sehingga proyek perubahan ini dapat terlaksana dengan baik.

2. Struktur Organisasi Pelaksana dan Tim Efektif

Komposisi tim yang efektif idealnya terdiri dari: pemimpin, pembentuk, pemikir, pengevaluasi, penyelidik sumber daya, pekerja tim, dan penyelaras akhir. Untuk mendukung keberhasilan proyek perubahan ini, maka dibentuk tim efektif yang terdiri dari Mentor, *Project Leader*, Tim Substansi, Tim Penyusun Pedoman dan SOP, Tim IT dan Tim Pendukung yang disusun dalam tabel berikut:

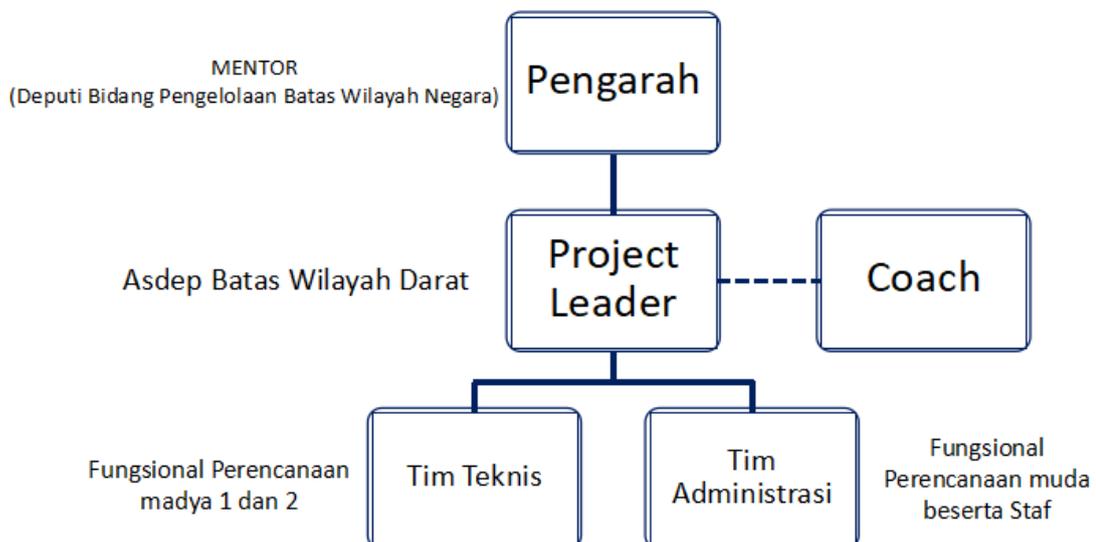
Tabel 4. Daftar Tim Efektif

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pengarah	Dr. Robert Simbolon, MPA.
2.	<i>Project Leader</i>	Drs. Ismawan Harijono, M.Si.
3.	Tim Substansi	Dr. Agustin Sagala, M.Si Yulianis, S.Sos.
4.	Tim Penyusun Pedoman dan SOP	Hega Mitasari, S.STP, M.AP. Taryani, S.E David Sebahang S.Sos, M.Si
5.	Tim IT	Andi Nurdiansyah, S.STP Novi Nur Aini, S.Si Rara Febriska, S.IP

NO.	JABATAN	NAMA
		Ajeng Setry Kinanti, S.IP Prasca Uli Rewardani, S.I.Kom Duta Setyabudi, S.Pd
6.	Tim Pendukung	William Coatant Tethool, S.STP Tobari, S.AP Muhammad Fajar Irfandi, S.Sos Puspita Hanum Dyah Satiti, S.Si. Muhammad Syarifuddin, S.T Rudy Shantoro, S.T Hartanto, S.E

3. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan

Tata Kelola proyek perubahan merupakan struktur yang digunakan dalam proyek perubahan yang meliputi sponsor, *project leader* dan anggota tim. Penjelasan disajikan sebagai berikut :



Gambar 9. Tata Kelola Proyek Perubahan

4. Tugas dan Kewenangan Tim Efektif

Tim Efektif memiliki tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Proyek Perubahan;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Proyek Perubahan;

- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan;
 - d. Menyiapkan draft penyusunan modul, pedoman dan SOP kegiatan Proyek Perubahan;
 - e. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan;
 - f. Meyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh *project leader*.
5. Masa Berlaku dan Etika serta Mekanisme Tim Efektif

Masa berlaku tim efektif terhitung sejak disahkan dalam Surat Keputusan Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat dan akan berakhir setelah *Milestone* jangka panjang 1 tahun telah terlaksana. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Tim Efektif pada Proyek Perubahan, Tim Efektif memegang teguh kode etik dan kode perilaku PNS sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Mekanisme kerja Tim Efektif pada Proyek Perubahan ini memiliki 3 (tiga) komponen utama yang terdiri dari mentor sebagai pengarah, *project leader* sebagai pengambil keputusan, dan tim sebagai pelaksana kegiatan.

6. Monitoring dan Evaluasi

Untuk pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Tim Efektif dalam pelaksanaan Proyek Perubahan akan dilakukan setiap bulan. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi terhadap *progress*, keluaran, hasil, dan indikator keberhasilan.

I. RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI SEBAGAI TINDAKLANJUT DARI SELF ASSESMENT DIRI

Rencana Pengembangan potendi diri sebagai tindak lanjut dari *self assessment* diri adalah sebagai berikut :



Gambar 10. Bagan Rencana Pengembangan Potensi Diri

BAB II

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS

Implementasi Proyek Perubahan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara di Badan Nasional Pengelola Perbatasan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Efektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Rangka Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Negara

- a. Uraian dan Output Kegiatan

Kegiatan membentuk Tim Efektif proyek perubahan dilakukan pada tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober 2022 di lingkungan kerja *project leader*, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Pada kegiatan pembentukan tim efektif ini terdapat tiga tahapan yang dilakukan oleh *project leader*, yaitu:

- 1) Rapat Koordinasi Internal Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat

Setelah *project leader* menyusun Proyek Perubahan, *project leader* kemudian melakukan rapat internal Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat. Rapat tersebut membahas pembentukan tim efektif yang akan membantu *project leader* dalam mengimplementasikan rancangan proyek perubahan. Tim efektif terbagi dalam empat kelompok tim kerja, yaitu tim substansi, tim penyusunan pedoman dan SOP, tim IT, dan tim Pendukung.

- 2) Pembuatan SK tim efektif

Hasil rapat koordinasi internal *Project Leader* berkomunikasi dengan atasan dalam hal ini Sekretaris BNPP untuk menyusun SK tim efektif. *Project Leader* memberikan penjelasan kepada Sekretaris BNPP terkait *urgensi* dari kegiatan proyek perubahan yang telah digagas. Penjelasan terkait tugas dan fungsi tim efektif untuk

mendukung kegiatan Proyek Perubahan terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara.

3) Pembahasan Rencana Aksi Pelaksanaan Proyek Perubahan bersama tim Efektif

Setelah SK tim efektif dibuat, *project leader* melakukan pembahasan terkait rencana aksi proyek perubahan. Tim Efektif berkoordinasi untuk membuat rancangan rencana aksi pelaksanaan proyek perubahan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Penyusunan rencana aksi ini mengacu pada milestone yang telah dibuat pada rancangan proyek perubahan.

b. Evidence/Bukti



Gambar 11. Undangan Rapat Internal Pembentukan Tim Efektif

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH BARAT

DAFTAR HADIR

Kegiatan: Pembahasan Proyek Perbatasan
Tanggal: 04 Oktober 2022
Jam: 10.00 WIB - Selesai
Tempat: Ruang Rapat Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Barat

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ISMUDDY H	AS BPTJ TASA	
2	Agustin S	Perwakilan Ahli Madya, Pusat Pusat BPTJ	
3	Yulson		
4	DINDO IKONJACO	Manajemen Muda	
5	Hapsi Nidharul	Perwakilan Muda Pusat, BPTJ	
6	Kerjani	Perwakilan Muda	
7	Pan Tereke H	BK	
8	Harlaning	Staf Bantuk	
9	Agus Kemas	JPU	
10	Pring Serry Imanah	JPU	
11	Muhammad Nur i	Staf Jany	
12	Riska LD Kusriana	Staf Jany	
13	Yusuf Saqibul	Staf PA/PA	
14	Rody Sembur	Staf Jany	
15	Dikhan Tolhul	Staf Jany	
16	Yani Ayu Ayu	Staf Jany	

Gambar 12. Daftar Hadir Rapat



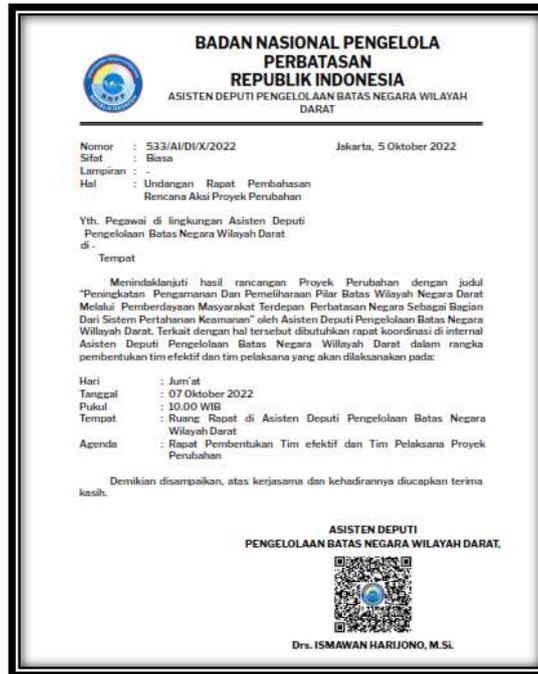
Gambar 13. Dokumentasi Rapat



Gambar 14. Notulensi Rapat



Gambar 15. SK Tim Efektif



Gambar 16. Undangan Rapat



Gambar 17. Dokumentasi Rapat Tim Efektif



Gambar 18. Rencana Aksi Pelaksanaan Proyek Perubahan

2. Meningkatkan networking dan kerjasama dengan mitra K/L terkait dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Perbatasan

a. Uraian dan Output Kegiatan

Kegiatan membangun *networking* dengan mitra K/L terkait dan pemerintah daerah dilakukan pada tanggal 24 Oktober sampai dengan 2 November 2022 di lingkungan kerja *project leader*, Asisten Deputi

Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Pada kegiatan ini *project leader* membangun *networking* dengan mitra K/L, diantaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Badan Informasi Geospasial. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah diantaranya Pemerintah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Pada kegiatan membangun *networking* ini terdapat dua tahapan yang dilakukan oleh *project leader*, yaitu:

- 1) Rapat Koordinasi dengan Mitra K/L terkait koordinasi Rencana Kegiatan Proyek Perubahan dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara
- 2) Rapat koordinasi dengan stakeholders (Pemda) terkait Kegiatan Proyek Perubahan dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara

b. Bukti/Evidence



Gambar 19. Undangan Rapat dengan mitra K/L

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAH
SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN
JAWARTA, 24 OKTOBER 2022

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Dr. Yonimus Mulyono, M.Si	Ases		[Signature]
2.	MOHAR RAHARDY	Kasubag Angkasa	Dir. Perencanaan & Kabin	[Signature]
3.	ARDIANAN JATI, MT	Staf Teknis	BIG	[Signature]
4.	Samudra H	Pen. Monev	BRINMAS	[Signature]
5.	NOLETIA YN	PROV. STAF I STRUKTUR	MABESAD	[Signature]
6.	Fitriyanti E	PLS2 PUSP 2010 PUSKAD	INSTRUKSI	[Signature]
7.	BEKI USHADI, ST, MGI	PLS 2, PUSP 2010 STRUKTUR TALI	MABES TALI	[Signature]
8.	Alexander Ginting, S.T	Plm V Struktur Monev	Mabes TUI DL	[Signature]

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
32.	Hoga Khatun	Manajer HRD & HRD	PTV	[Signature]
33.	Rita Sembangun	JPU Struktur	ANPP	[Signature]
34.	Yuliana	Manajer Mutu	BAPV	[Signature]
35.	Isyoni	Manajer Negeri	BAK	[Signature]
36.	Peter Daryanto	JP Perencanaan	ANPP	[Signature]
37.	Agustina Angela	JP Perencanaan Anal. Mutu	ANPP	[Signature]
38.	IRWAN	PERENCANAAN MUTU	ESUPP	[Signature]
39.	DAVID BERKHAJID	PERENCANAAN MUTU	ANPP	[Signature]

Gambar 20. Daftar Hadir Rapat



Gambar 21. Dokumentasi

NOTULENSI

Judul : Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Sebagai Bagian Dari Sistem Pertahanan Kawasan.
 Tanggal : 24 Oktober 2022
 Tempat : Hotel AGNE, Jakarta

1. Rapat dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara
2. Maksud & tujuannya rapat adalah:
 - a. Melakukan koordinasi awal dengan Stakeholder lingkup pertahanan wilayah negara;
 - b. Mengetahui upaya atau rencana kegiatan PPD.
3. Tujuan pelaksanaan rapat adalah:
 - a. Menelusuri informasi atau rencana pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Kawasan;
 - b. Menyampaikan prospektif atau konsep kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan sebagai Bagian;
 - c. Menetapkan roadmap atau rencana pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan sebagai Bagian Dan Sistem Pertahanan.
4. Peserta rapat terdiri di perwakilan Kementerian/Lembaga yaitu:
 - a. Asisten Panglima TNI sebagai inisiasi dan master event;
 - b. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, BNPP;
 - c. Direktur Pengelolaan Program dan Anggaran, Ditjen Strategi, Kemhan;
 - d. Direktur Kerjasama, Penelitian dan Batas Antar Negara, Ditjen BAK, Kemendagri;
 - e. Direktur Fasilitas Pengabdian/Kelembagaan Aparatur Desa, Direktorat Jenderal Bina Perencanaan Desa, Kemendagri;
 - f. Direktur Perencanaan, Analisis dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PRR/Bappenas;
 - g. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Deputi Bidang Politik, Fungsi, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PRR/Bappenas;
 - h. Direktur C Dan TN;
 - i. Direktur Integritas Geospasial, Deputi IV BPN;
 - j. Kepala Pusat Perencanaan Batas Wilayah, BPN;
 - k. Paman I (Sementara) TNI;
 - l. Paman I (Asisten AD);
 - m. Paman VI Ops DN Sespasi;
 - n. Paman II Asatg AD;
 - o. Paman Ahli Bid DMP Pengantar KI; Tar;
 - p. Pemantau BPN Masyarakat Asatry Pengantar Batas Negara Wilayah Darat, BNPP.

- q. Pemantau AAS Mula yaitu Asatry Pengantar Batas Negara Wilayah Darat, BNPP;
 - r. JPU/Asatry dan Staf di lingkungan Asatry Pengantar Batas Negara Wilayah Darat, BNPP.
5. Durasi Rapat
 - a. Lembat Poin (waktu Asatry Pengantar TN)
 - Saat ini Badan Tugas Pengawasan Pertahanan (BATAS/PMBATAS) tetap melakukan kegiatan tugas pengawasan perbatasan/kawasan negara, tetapi masih dibatasi perbatasan/pada dalam kondisi normal atau hilang;
 - Jumlah personel Batas-Pertahanan yang dipusatkan pada pos-pos di wilayah perbatasan masih sedikit, hal ini memerlukan pemertanian/pertahanan yang dapat menyinkronkan hingga ke kawasan perbatasan/kawasan negara;
 - Selama ini masih terbanyak kunjungan masyarakat atau perantara/pusat-pusat lokal sebagai titik kontak wilayah antar negara dalam rangka kegiatan keadilan wilayah (KKB).
 - b. Pak Rival Hasbiul, Batas Antar Negara KEMENDAGRI (Wakil Deputi/Kawasa Pertahanan Batas Antar Negara)
 - Perlu diluar bentuk-bentuk konsep pemberdayaan masyarakat untuk membangun dan memelihara pita perbatasan negara;
 - Perlu melihat kecapaian pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan dapat berkoordinasi dengan baik.
 - c. Lembat Anas, TNI
 - Perlu melihat batas negara merupakan titik kontak perbatasan wilayah negara (dalam hal perbatasan/kawasan negara dalam kondisi hilang dapat memengaruhi keamanan pada Tim Terdepan perbatasan batas antar Indonesia-Malaysia, RI-PNG dan RI-KOR).
 - Sudah seharusnya masyarakat dibekali secara aktif di wilayah perbatasan pertahanan untuk siap menghadapi dan menanggapi kondisi batas negara. Sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya bahwa personel yang dipusatkan di perbatasan sangat sedikit jika dibandingkan dengan personel batas antar negara-tengah negara lainnya.
 6. Hasil Rapat
 - a. Perlu dilaksanakan konsep pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan sebagai Bagian dari Sistem Pertahanan Kawasan;
 - b. BNPP perlu mengkoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah terkait sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - c. BNPP perlu melihat wilayah yang memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Kawasan;
 - d. Kegiatan yang melibatkan masyarakat perlu dilaksanakan pemerintah desa (desa) atau lembaga lokal wilayah sebagai model untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai kemampuan yang dapat dilaksanakan.

Gambar 22. Notulensi

Nomor : MSJ.41/01/3.2022 (Jakarta, 28 Oktober 2022)
 Sifat : Segi
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Unduh/ingat Negara

VII. Poin-poin dalam Daftar Terlampir
 23.

Daftar tersebut disampaikan bahwa dalam rangka Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Pertahanan (PDRW-PP), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara akan melaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Pertahanan Negara dalam Menjaga Pertahanan Nasional Melalui Pengelolaan Pita Batas Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 November 2022
 Waktu : 09.30 WIB s.d. selesai
 Tempat : Aula Kantor Bupati Kepulauan Seribu
 Agenda : Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Sebagai Bagian Dari Sistem Pertahanan Kawasan.

Pemeriksaan rapat dilakukan tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu dengan penyediaan Covid-19. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Novi Nur Anis MF. 081108690865 atau email: pnpb@bnpb.go.id atau: www.bnpb.go.id
 Demikian untuk menjadi maklum. Atas kerjasamanya dan kepatuhannya diharapkan terimakasih.

ASISTEN DEPUTI
 PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT



DR. DAMAMAN HARJONO, MSi

Terselamatkan Yth:
 1. Bupati Kepulauan BNPP, sebagai inisiasi.
 2. Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP.

DAFTAR PESERTA
RAPAT KOORDINASI RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN PERBATASAN NEGARA SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERTAHANAN KAWASAN

1. Bupati Kepulauan Seribu;
2. Sekretaris Daerah Kab. Seribu;
3. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Camat Sajegan Besar, Seribu;
5. Camat Pantai, Seribu;
6. JPU dan Staf di lingkungan Asatry Pengantar Batas Negara Wilayah Darat, BNPP.

Gambar 23. Undang-an Rapat dengan Pemerintah Daerah

REKORD RAPAT KOORDINASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN
SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Nasional

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	Dr. Suryo, M.Si	Asisten Praktisi	<i>[Signature]</i>
2.	I. Susanto	Ketua TPK	<i>[Signature]</i>
3.	Teguh Subianto	Sub Koordinator Bag. Tapan	<i>[Signature]</i>
4.	Kardi	Asst. Bag. Tapan	<i>[Signature]</i>
5.	Van Rosson	Sekretaris TPK	<i>[Signature]</i>
	Sesay Nugroho	Asst. Bag. Tapan	<i>[Signature]</i>
	Wahidius Ismail	Bagian Tapan	<i>[Signature]</i>
	Diaa Bastika	Bagian Tapan	<i>[Signature]</i>
	Ulhas Julani	Bagian Tapan	<i>[Signature]</i>

Gambar 24. Daftar Hadir Rapat



Gambar 25. Dokumentasi



Gambar 26. Notulensi

3. Menyusun modul pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara

a. Uraian dan Output Kegiatan

Kegiatan membangun modul pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan dilakukan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 1 November 2022. Pada kegiatan penyusunan modul ini *project leader* membangun dengan mitra K/L, diantaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Badan Informasi Geospasial. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah diantaranya Pemerintah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Pada kegiatan penyusunan modul pemberdayaan masyarakat ini terdapat dua tahapan yang dilakukan oleh *project leader*, yaitu:

- 1) Rapat Koordinasi penyusunan modul kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara dengan mitra K/L

2) Rapat koordinasi penyusunan modul kegiatan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara dengan *stakeholder*

b. Bukti/Evidence



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA MELAKAH DARAT

Alamat: Jl. Raya Garuda No. 10, Komplek Garuda, 02001 Bogor, Jawa Barat
Telp: (0251) 8311111, 8311112, 8311113, 8311114, 8311115, 8311116, 8311117, 8311118, 8311119, 8311120, 8311121, 8311122, 8311123, 8311124, 8311125, 8311126, 8311127, 8311128, 8311129, 8311130, 8311131, 8311132, 8311133, 8311134, 8311135, 8311136, 8311137, 8311138, 8311139, 8311140, 8311141, 8311142, 8311143, 8311144, 8311145, 8311146, 8311147, 8311148, 8311149, 8311150, 8311151, 8311152, 8311153, 8311154, 8311155, 8311156, 8311157, 8311158, 8311159, 8311160, 8311161, 8311162, 8311163, 8311164, 8311165, 8311166, 8311167, 8311168, 8311169, 8311170, 8311171, 8311172, 8311173, 8311174, 8311175, 8311176, 8311177, 8311178, 8311179, 8311180, 8311181, 8311182, 8311183, 8311184, 8311185, 8311186, 8311187, 8311188, 8311189, 8311190, 8311191, 8311192, 8311193, 8311194, 8311195, 8311196, 8311197, 8311198, 8311199, 8311200

Surat : ST/140/VI/0-2022
Salah : 1 (satu) lembar
Lampiran : 1 (satu) lembar
Tgl : 24 Oktober 2022

Yth. Para Pejabat/Instansi/Giat/Perwakilan
di:
Tersebut

Dengan hormat saya sampaikan bahwa dalam rangka Penyiapan Perbatasan Wilayah Negara dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Pertahanan (PILW/PK) dalam Rangka Pengabdian Masyarakat di Kawasan Perbatasan Batas Negara Wilayah Darat akan melaksanakan Rapat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara.

Berkas undangan terlampir, menginformasikan kepada Bapak/Ibu/Instansi pada rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Gedung Gedung Merah
A Gedung Garuda No. 10, Komplek Garuda 02001 Bogor

Agenda : Penyusunan Modul Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara

Pelaksanaan rapat diharapkan dapat memotivasi seluruh kehadiran untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas kerja. Adapun yang ditugaskan sebagai berikut:
1. Menyiapkan modul kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam menjaga pertahanan keamanan melalui penjagaan pilar batas negara.

Selamat dan semoga sukses. Atas kerjasamanya akan kami hargai dengan apresiasi terbaik.

ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA MELAKAH DARAT

H. HANIKAH HANIKAH, S.H.

Terlampir terdapat:
1. Surat Undangan (UND), sebagai undangan
2. Surat Keputusan (SK) sebagai Keputusan

LAMPYUN SURAT SELEP PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT, BNPPI
NOMOR : ST/140/VI/0-2022
TANGGAL : 24 Oktober 2022

DAFTAR PESERTA

RAJUT KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN PERBATASAN NEGARA DALAM MENJAGA PERTAHANAN KEAMANAN MELALUI PENJAGAAN PILAR BATAS NEGARA

1. Dicky Dicky, Pengawasan Batas Wilayah Negara, BNPPI
2. Anisa Pengiran TM
3. Azzam Pengiran TM
4. Apollia Ruzia Setiawan Perkelompok Kamolan
5. Anisa Pengiran Batas Wilayah Negara Lada dan Lada, BNPPI
6. Anisa Pengiran Lada Batas Negara, BNPPI
7. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
8. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
9. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
10. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
11. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
12. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
13. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
14. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
15. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
16. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
17. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
18. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
19. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
20. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
21. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
22. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang
23. Shafiqul Kamal, Pengawasan Batas Wilayah Negara, Digos BSM, Negeri Sembawang

Gambar 27. Undangan Rapat dengan Mitra K/L

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	ESTERINA	Asisten Deputi	BNPPI	
2	Agung Sugih	Asisten Deputi	BNPPI	
3	Toni	Asisten Deputi	BNPPI	
4	Hani Rizka	Asisten Deputi	BNPPI	
5	Rizka	Asisten Deputi	BNPPI	
6	Agus	Asisten Deputi	BNPPI	
7	Adrian	Asisten Deputi	BNPPI	

Gambar 28. Daftar Hadir Rapat



Gambar 29. Dokumentasi



Gambar 33. Dokumentasi



Gambar 34. Notulensi



Gambar 35. Modul

4. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot project*

a. Uraian dan Output Kegiatan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai *pilot project* dilakukan pada tanggal 7 sampai dengan 25 November 2022. Pada kegiatan penyusunan modul ini *project leader* melaksanakan kegiatan *pilot project* berupa Pada kegiatan penyusunan modul pemberdayaan masyarakat ini terdapat dua tahapan yang dilakukan oleh *project leader*, yaitu:

- 1) Rapat Internal Persiapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai *pilot project*
- 2) Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait persiapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai *pilot project*
- 3) Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai *pilot project*

b. Bukti/Evidence



Gambar 36. Undangan Rapat Internal

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
SISTEM KEPETI PENGELOLAAN BATAS NEGARA MELAKUKI DMMAT

DAFTAR HADIR

Kategori : Rapat Persiapan Kegiatan Pembentukan Masyarakat Desa
 Tujuan : Sosialisasi Perbatasan
 Tanggal : 7 November 2022
 Wktu : 10.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat di Hotel Grand Pangrehan Bawah Nagas, Mawang
 Damar

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ismaeliana W	ASALIP PANGAS	
2	Agung W	ASALIP PANGAS	
3	Abdul Kadir	ASALIP PANGAS	
4	Agung W	ASALIP PANGAS	
5	Haji Mubandari	ASALIP PANGAS	
6	M. Yogi Purandari	ASALIP PANGAS	
7	Agung W	ASALIP PANGAS	
8	Agung W	ASALIP PANGAS	
9	Agung W	ASALIP PANGAS	
10	Agung W	ASALIP PANGAS	
11	Agung W	ASALIP PANGAS	
12	Agung W	ASALIP PANGAS	
13	Agung W	ASALIP PANGAS	
14	Agung W	ASALIP PANGAS	
15	Agung W	ASALIP PANGAS	
16	Agung W	ASALIP PANGAS	
17	Agung W	ASALIP PANGAS	

Gambar 37. Daftar Hadir Rapat



Gambar 38. Dokumentasi

Nama : Drs. Imanwan Harjono, M.S.
 NP : 9680331899021001
 Unit Kerja : Badan Nasional Pengelola Perbatasan
 Jabatan : Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
 Kegiatan : Dibuat Penetapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai Pilot Project
 Tanggal : Senin, 7 November 2022

- Notulensi :
1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai Pilot Project akan dilaksanakan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23-25 November 2022.
 2. Pada tanggal 9-12 November 2022 Tim Aju akan melakukan koordinasi dengan Dinas Tata Pemerintahan Kabupaten Sambas, Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Sambas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar.
 3. Membuat daftar kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai Pilot Project.
 4. Membagi penanggung jawab untuk masing-masing tugas pada saat pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai Pilot Project.
 5. Menyusun surat undangan untuk peserta dan narasumber.
 6. Memastikan kesiapan narasumber untuk hadir dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai Pilot Project.
 7. Perencanaan konsep acara dan jadwal kegiatan di lapangan.

Gambar 39. Notulensi



Gambar 40. Dokumentasi Tim Aju

1. Product

Produk yang dihasilkan dari implementasi Proyek Perubahan ini adalah keterlibatan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara

2. Price

Dalam rangka implementasi strategi percepatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara perlu didukung oleh kolaborasi perencanaan anggaran antara K/L dan Pemerintah Daerah

3. Promotion

Dalam rangka implementasi strategi promosi, kegiatan promosi dilakukan dengan melakukan campaign dalam semua media yang dimiliki oleh BNPP seperti grup wa, facebook, Instagram dll secara masiv dan berkelanjutan

4. Place

Implementasi Proyek Perubahan dilaksanakan di lingkungan Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Pelaksanaan *pilot project* kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

5. Customer

Implementasi proyek perubahan dengan target masyarakat desa terdepan perbatasan negara yang terdiri dari elemen Masyarakat diantaranya Aparatur Pemerintah Desa, Pamtas, Linmas, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Cendekiawan.

Pelaksanaan proyek perubahan dengan menggunakan strategi marketing sesuai dengan jadwal yang disusun, seluruh tahapan kegiatan milestone dapat terlaksana dengan baik.

C. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

Dalam proses implementasi proyek perubahan, telah terjadi proses pembelajaran baik oleh *project leader*, tim efektif, mitra K/L dan Pemerintah Daerah. Dalam implementasi Proyek Perubahan memberikan kesempatan pengembangan diri untuk masing-masing elemen yang terlibat diantaranya :

1. Mampu dalam mengembangkan jaringan kerja (*networking*). Dalam implementasi Proyek perubahan tim mampu mengembangkan jalinan kerja dengan berbagai individu atau kelompok dan menjadi salah satu kunci dalam

mencapai tujuan. Tim mengembangkan keahlian dalam menjalin hubungan kerja, sehingga berhasil dan mampu mempertahankan diri demi kelangsungan hidup.

2. Mampu bekerjasama (teamwork) dengan berbagai pihak dalam mengembangkan keunggulan spesifiknya. Dalam implementasi Proyek perubahan tim dituntut mempunyai keunggulan spesifik dan memiliki kemampuan mengembangkan keunggulan spesifiknya dengan membangun suatu teamwork. Tim tidak dapat lagi memisahkan diri dan bersikap individualistik, menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain sudah menjadi keharusan dalam rangka menciptakan produk-produk yang unggul sebagai output dari Proyek Perubahan.
3. Mengutamakan kualitas yang tinggi. Dalam implementasi Proyek perubahan tim terus menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menghasilkan produk. Sehingga produk yang dihasilkan dapat ditingkatkan kualitasnya secara terus-menerus dan berkelanjutan.

BAB III

PENUTUP

A. LESSON LEARNT

Berdasarkan implementasi kegiatan Proyek Perubahan dan seluruh kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional, pembelajaran yang didapatkan oleh Project Leader dalam kepemimpinan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Komitmen Bersama antara Mentor, Project Leader dan Tim Efektif untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan.
2. Sinergitas antara pemerintah Pusat, Mitra K/L dan Pemerintah Daerah.
3. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam melaksanakan Proyek Perubahan.

B. KESIMPULAN

1. Kegiatan proyek perubahan ini bertujuan untuk meningkatkannya keamanan dan terpeliharanya tanda batas wilayah negara pada desa perbatasan negara serta pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam memelihara tanda batas wilayah negara.
2. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project* merupakan output proyek perubahan jangka pendek dengan output jangka panjangnya yakni pemberdayagunaan masyarakat menjaga Perbatasan (Mentas) sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta.

C. SARAN

1. Perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam menjaga perbatasan.
2. Penyusunan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan terkait Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara perlu diprioritaskan sebagai dasar pemerintah daerah mengadakan kegiatan ini secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Modul:

Irawati, Erna. 2021. Isu Strategis. Modul PKN Tingkat II. Lembaga Administrasi Negara.

Supriadi, Hary. 2021. Marketing Sektor Publik. Modul PKN Tingkat II. Lembaga Administrasi Negara.

Muttaqin, Tatang. 2021. Manajemen Strategis Sektor Publik. Modul PKN Tingkat II. Lembaga Administrasi Negara.

Catur. 2021. Energi Kepemimpinan. Modul PKN Tingkat II. Lembaga Administrasi Negara.

Wiryanta. 2021. Kepemimpinan Digital. Modul PKN Tingkat II. Lembaga Administrasi Negara.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Drs. ISMAWAN HARIJONO, M.Si
NIP : 196902031989021001
TTL : Ambon, 3 Februari 1969
AGAMA : Islam
PANGKAT/GOL : Pembina Utama Muda/IVc
PENDIDIKAN TERAKHIR : Magister Ilmu Sosial Universitas Padjajaran
JABATAN : Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP
ALAMAT : Jalan Kedaung No. 27 Larangan Indah Kota Tangerang
NO. TELEFON : 081290707757
ALAMAT EMAIL : ismawanharijono1969@gmail.com

RIWAYAT KEPANGKATAN				
No.	Pangkat/Gol. Ruang	No. SK	Tgl SK	TMT Pangkat
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	00005/KEP/AA/15001/22	2 Maret 2022	1 April 2022
2	Pembina Tk. I (IV/b)	823.4-1363	28 Maret 2014	1 April 2014
3	Pembina (IV/a)	811.234-800	29 Maret 2010	1 April 2010
4	Penata Tk. I (III/d)	823.3/298/SK/X/2004	29 Oktober 2004	1 Oktober 2004
5	Penata (III/c)	822.3/SK/03/2002	18 Februari 2002	1 Januari 2002
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	817.123.3-858	2 Maret 2001	1 April 2001
7	Penata Muda (III/a)	817.133-3429	30 September 1997	1 Oktober 1997
8	Pengatur (II/c)	W.IV01-23/00219/IV/Kep/95	31 April 1995	1 April 1995
9	Pengatur Muka Tk. I (II/b)	0123/00275/Kep/IV/1993	17 Mei 1993	1 April 1993
10	Pengatur Muda (II/a)	91a/UP	16 Pebruari 1990	1 Maret 1990
11	Pengatur Muda (II/a)	697/UP	27 Maret 1989	1 Pebruari 1989

RIWAYAT JABATAN			
No.	Pangkat/Gol. Ruang	Eselon	TMT Jabatan
1	Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	II/a	26 Oktober 2021
2	Kepala Bidang perencanaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra	III/a	6 September 2015
3	Kepala Bagian Kepegawaian BNPP	III/a	14 Januari 2014
4	Kasubid Perencanaan Anggaran di Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan, Deputi Bidang Infrastruktur BNPP	IV/a	5 November 2010
5	Staff Pada Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri		1 Pebruari 2009
6	Camat	III/a	27 Maret 2003
7	Kasubag Pemerintahan Desa		26 Nopember 2001
8	Sekretaris Kecamatan		26 Juni 2000
9	Sekretaris Pribadi Gubernur Maluku		12 Nopember 1997
10	ADC Gubernur Maluku		13 Agustus 1994
11	Kaur. Pemerintahan Kec. Maba Kab. Halmahera Tengah Prov. Maluku		4 Mei 1992

RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM				
No.	Jenjang Pendidikan	Pendidikan/Fakultas/Jurusan	Nama Sekolah/PT	Tahun Lulus
1	S2	Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Pemerintahan	Universitas Padjajaran	2008
2	S1 IIP	Politik Pemerintahan	IIP Jakarta	1996
3	APDN	Pemerintahan	APDN Ambon	1991
4	SMA	IPA	SMAN 2 Ambon	1988
5	SMP	-	SMPN 6 Ambon	1986
6	SD	-	SDN 22 Ambon	1983

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UMUM				
No	Nama Diklat	Angkatan /tahun	Tempat	Panitia Penyelenggara
1	Diklat PIM Tk.III (SPAMA)	2005	Makassar/Regional Makassar	Diklat Regional Depdagri Makassar
2	Diklat PIM Tk. IV (ADUM)	1999	Ambon/Provinsi Maluku	Diklat Provinsi Maluku

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS				
No	Nama Diklat	Angkatan/tahun	Tempat	Panitia Penyelenggara
1	Bimtek Kepemimpinan Camat	2004	Jakarta	Depdagri
2	Bimtek Otonomi Daerah	2003	Jakarta	Depdagri
3	Bimtek Batas Daerah	2002	Jakarta	Depdagri

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL				
No	Nama Diklat	Angkatan/tahun	Tempat	Panitia Penyelenggara
1	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	2013	Jakarta	LKPP

PENGALAMAN SEBAGAI PEMBICARA PADA SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP NASIONAL/INTERNASIONAL				
No	Nama Seminar/Lokakarya/Simposium	Tahun	Tempat	Panitia Penyelenggara
1	Lokakarya Perbatasan Negara	2016	Hotel Jayakarta Bali	Kementerian Sosial
2	Pelatihan Pengelola Batas Negara Pada Acara Gema Guru Perbatasan	2015	Hotel Amaris	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3	Seminar Pengembangan Potensi Diri	2009	Hotel Aryaduta	Kementerian Koperasi
4	Seminar Wawasan Kebangsaan	2009	Hotel Jayakarta	Depdagri
5	Seminar Bahaya HIV	2008	Ruang Rapat Kemenkokesra	Kemenkokesra

RIWAYAT PENGHARGAAN/TANDA JASA			
No	Penghargaan//Tanda Jasa	Tahun	Asal Perolehan
1	Satya Lencana 20 Tahun	2015	Perpres
2	Satya Lencana 10 Tahun	2005	Perpres

Jakarta, 6 Oktober 2022

Drs. Ismawan Harijono, M.Si

LAMPIRAN

Lampiran 1. Undangan Rapat Internal Pembentukan Tim Efektif



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

Nomor : 534/A1/DI/X/2022
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Undangan Rapat Pembahasan Proyek
Perubahan

Jakarta, 6 Oktober 2022

Yth. Pegawai di lingkungan Asisten Deputi
Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat

di -
Tempat

Menindaklanjuti hasil rancangan Proyek Perubahan dengan judul "Peningkatan Pengamanan Dan Pemeliharaan Pilar Batas Wilayah Negara Darat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Dari Sistem Pertahanan Keamanan" oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat. Terkait dengan hal tersebut dibutuhkan rapat koordinasi di Internal Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat dalam rangka pembentukan tim efektif dan tim pelaksana yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Oktober 2022
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat di Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
Agenda : Rapat Pembentukan Tim Efektif dan Tim Pelaksana Proyek Perubahan

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**ASISTEN DEPUTI
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT,**

Drs. ISMAWAN HARUONO, M.Si.

Lampiran 2. Daftar Hadir Rapat



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pembahasan Proyek Perubahan
Tanggal : 06 Oktober 2022
Jam : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ISMARANI H	AS DEPTASDA	
2	Agustin S	Perencana Ahli Madya Tasrat	
3	Yulian	Pem Milyan	
4	DAVID SETHAJAG	perencana Muda	
5	Haga Nitiasari	Fungsional Muda Tasrat, BPP	
6	Taryani	Fungsional Muda	
7	Rara Febriata M	JRU	
8	Hartanto	staf tasrat	
9	Ajeng Liana	JFU	
10	Ajeng Sety Kianti	JFU	
11	Muhammad Fajar I.	Staf insery	
12	Pasca Uli Ruardina	Staf Tasrat	
13	Dita Setiabudi	staf A/da	
14	Pesty Shantoro	Staf Tasrat	
15	William Tetraso!	Staf Tasrat	
16	Nani Nur Aini	Staf Tasrat	

Lampiran 4. Notulensi Rapat

Nama : Drs. Ismawan Harijono, M.Si.
NIP : 196902031989021001
Unit Kerja : Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Jabatan : Asisten Deputi Pengelola Perbatasan
Kegiatan : Diskusi Penyusunan Proyek Perubahan
Tanggal : Selasa, 04 Oktober 2022

Notulensi :

1. Penyusunan Masalah dan Penyebab Masalah pada Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II Angkatan XXVIII
2. Penyusunan masalah berdasarkan aturan UU no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yaitu fungsi rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung. Sementara, TNI-Polri berfungsi sebagai kekuatan utama.
3. Menyusun deskripsi berdasarkan rancangan Proyek Perubahan dengan berlandaskan pelibatan peran masyarakat dalam pengamanan dan pemeliharaan pilar batas wilayah negara.
4. Perumusan permasalahan terkait pengelolaan batas wilayah negara yaitu
 - a. Belum selesainya penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga
 - b. Belum maksimalnya pengawasan dan pemeliharaan pilar batas negara
 - c. Minimnya keterlibatan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam pengamanan dan pemeliharaan pilar batas
5. Refleksi tentang kondisi eksisting dan kondisi ideal
6. Mengelaborasi tujuan dan manfaat proyek perubahan untuk jangka pendek (60 hari), jangka menengah (6 bulan), dan jangka panjang (1 tahun)
7. Penyusunan tahapan perubahan Proyek Perubahan untuk jangka pendek (60 hari), jangka menengah (6 bulan), dan jangka panjang (1 tahun)
8. Menyesuaikan isi proposal dengan kerangka yang telah diarahkan oleh coach dan masukan dari mentor
9. Menyusun paparan sesuai dengan Rancangan Proyek Perubahan yang telah disusun.

Lampiran 5. SK Tim Efektif



KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TERDEPAN PERBATASAN NEGARA DALAM DALAM MENJAGA
PERTAHANAN KEAMANAN MELALUI PENJAGAAN PILAR BATAS NEGARA
TAHUN 2022

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sesuai Surat Sekretaris Jenderal Nomor 094/4941/SJ tentang Surat Perintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Tim Efektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

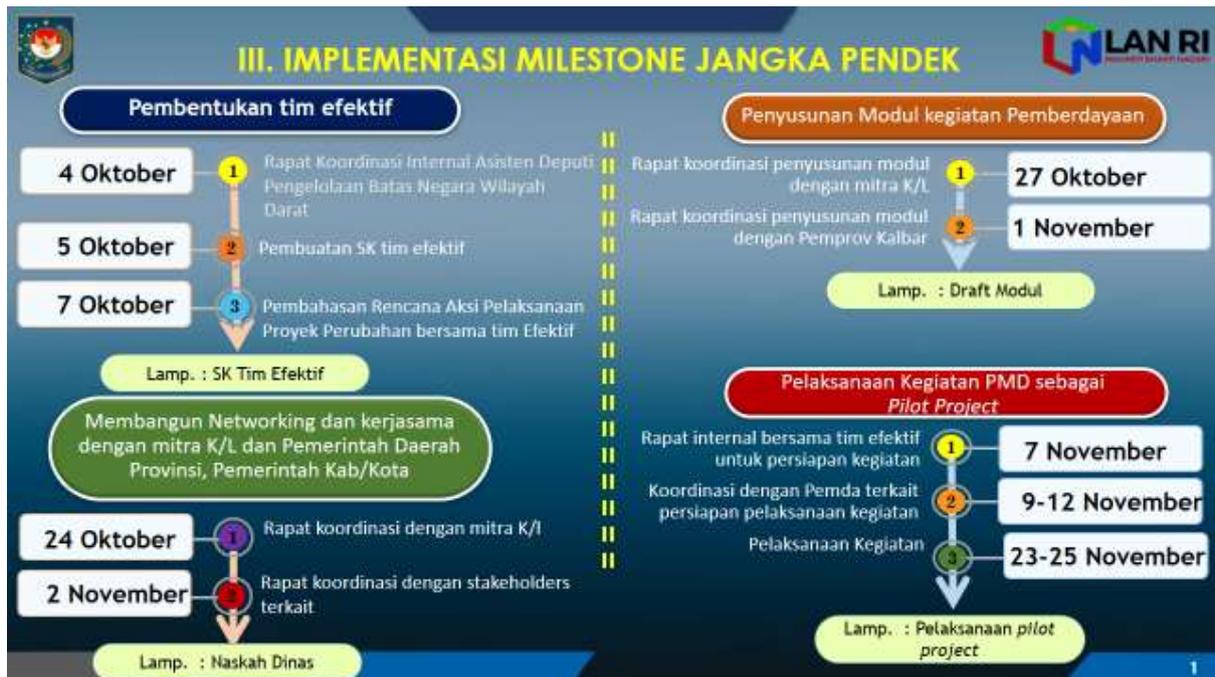
Lampiran 6. Undangan Rapat Pembahasan Rencana Aksi Proyek Perubahan

	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA
	ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
<hr/>	
Nomor : 533/AI/DI/X/2022	Jakarta, 5 Oktober 2022
Sifat : Biasa	
Lampiran : -	
Hal : Undangan Rapat Pembahasan Rencana Aksi Proyek Perubahan	
Yth. Pegawai di lingkungan Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat di - Tempat	
Menindaklanjuti hasil rancangan Proyek Perubahan dengan judul "Peningkatan Pengamanan Dan Pemeliharaan Pilar Batas Wilayah Negara Darat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Dari Sistem Pertahanan Keamanan" oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat. Terkait dengan hal tersebut dibutuhkan rapat koordinasi di internal Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat dalam rangka pembentukan tim efektif dan tim pelaksana yang akan dilaksanakan pada:	
Hari : Jum'at	
Tanggal : 07 Oktober 2022	
Pukul : 10.00 WIB	
Tempat : Ruang Rapat di Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	
Agenda : Rapat Pembentukan Tim efektif dan Tim Pelaksana Proyek Perubahan	
Demikian disampaikan, atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.	
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT,	
	
Drs. ISMAWAN HARIJONO, M.Si	

Lampiran 7. Dokumentasi Rapat Tim Efektif



Lampiran 8. Rencana Aksi Pelaksanaan Proyek Perubahan



Lampiran 9. Undangan Rapat Koordinasi dengan mitra K/L



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
Jalan Kebon Sirih Nomor 31 Jakarta Pusat-10340 Telp: 021-3142242 Website: www.bnpp.go.id

Nomor : 556/Al/DI/X/2022 Jakarta, 17 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Para Pejabat dalam Daftar Terlampir
di-

Tempat

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka Peningkatan Pertahanan Wilayah Negara dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP), Badan Nasional Pengelola Perbatasan c.q Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara akan melaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Oktober 2022
Waktu : 09.30 WIB s.d Selesai
Tempat : AONE Hotel
Jl. Wahid Hasyim, No. 80, RT.15/RW.3, Kebon Sirih, Kecamatan Mentang Jakarta Pusat
Agenda : Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Sebagai Bagian Dari Sistem Pertahanan Keamanan.

Pelaksanaan rapat dimaksud tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Novi Nur Aini HP. 082158805865 atau email: asdepbatasdarat@gmail.com, atau Fax (021) 021-3140461.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**ASISTEN DEPUTI
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT,**



Drs. ISMAWAN HARUONO, M.Si

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris BNPP, sebagai laporan.
2. Bapak Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP.

LAMPIRAN SURAT ASDEP PENGELOLAAN
BATAS NEGARA WILAYAH DARAT, BNPP
NOMOR : 556/Al/DI/X/2022
TANGGAL : 17 Oktober 2022

DAFTAR PESERTA
RAPAT KOORDINASI RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA TERDEPAN PERBATASAN NEGARA SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERTAHANAN
KEAMANAN

1. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP;
2. Asops Panglima TNI;
3. Asrenum Panglima TNI;
4. Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kemhan;
5. Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, BNPP;
6. Asdep Pengelolaan Lintas Batas Negara, BNPP
7. Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Antar Negara, Ditjen BAK, Kemendagri;
8. Direktur Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri;
9. Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kemlu;
10. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Wilayah Pertahanan, Strahan, Kemhan;
12. Direktur Pengendalian Program dan Anggaran, Ditjen Renhan, Kemhan;
13. Direktur Topografi, TNI AD;
14. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG;
15. Kepala Kelompok Sahli Pangdam XII/Tpr;
16. Paban VI Surta/Sops Mabes TNI;
17. Paban I Srenum TNI;
18. Paban I Asrena AD;
19. Paban III Aslog AD;
20. Asops Kasdam, XII Tpr;
21. Kaurtematik Silahdata Topdam XII/Tpr;
22. Perencana Ahli Madya pada Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP;
23. Perencana Ahli Muda pada Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP;
24. JFU dan Staf di lingkungan Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP.

Lampiran 10. Daftar Hadir Rapat Koordinasi dengan Mitra K/L

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN
SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN
JAKARTA, 24 OKTOBER 2022

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Pte. Istikomah Haryanto, Msi	Ases "KOR"		A
2.	HERRY ANZARDY	Kasubag Renc. & P.	Brim Penerimaan Kudu	JHT
3.	ARDIAWAN JATI, MT	Staf Teknis	BIG	A
4.	Benny N	Koordinator	KOMMAN	BNP
5.	ADIETYA YU	PADA 3 STAN I SREKAP	MABESAD	T
6.	TIT JATI S	Pty 2 PNB 2 BLW SREKAP	MABESAD	T
7.	BENI USHADI, ST Msi	Pty 2 PNB SREKAP TAI	Mabes TAI	BNK
8.	Alexander Ginting, S.T	Pbn V SREKAP MABESAD	Mabes TAI AL	ABP

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
33.	Hega Nitasari	Perencana ARI Muda Terat	BNPP	Hege
34.	Anu Wondangy	JAWA TERAT	BNPP	Anu
35.	Yuliana	Perencana Madya	BNPP	Yuliana
36.	Tony	Perencana Muda	BNPP	T
37.	Peteri Paryadi	JF Binas Dmat	BNPP	Peteri
38.	Agustin Sugala	JF Perencana ARI Madya	BNPP	Agustin
39.	IRWAN	PERENCANA MUDA	BNPP	IRWAN
40.	DAVID SEKARIS	PERENCANA MUDA	BNPP	DAVID

Lampiran 11. Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Mitra K/L



Lampiran 12. Notulensi Rapat Koordinasi dengan mitra K/L



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
Jalan Kebon Sirih Nomor 31, Jakarta Pusat 10340
Telepon (021) 3142142, Fax. (021) 31924491, Website: <http://www.bnpp.go.id>

NOTULENSI

Judul : Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Sebagai Bagian Dari Sistem Pertahanan Keamanan.
Tanggal : 24 Oktober 2022
Tempat : Hotel AONE, Jakarta

1. Rapat dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara
2. Maksud dilaksanakannya rapat adalah:
 - a. Melakukan koordinasi awal dengan Stakeholder lingkup pertahanan wilayah negara;
 - b. Mengetahui respons atas rencana kegiatan PMD.
3. Tujuan dilaksanakannya rapat adalah:
 - a. Memberikan informasi atas rencana pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan sebagai bagian dari Sishankam;
 - b. Menyelaraskan perspektif atas konsep kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan sebagai Bagian ;
 - c. Mendapatkan masukan atas rencana pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan sebagai bagian Dari Sishankam.
4. Peserta rapat meliputi perwakilan Kementerian/Lembaga yaitu:
 - a. Asops Panglima TNI (letkol riyandi dan mayor asep);
 - b. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, BNPP;
 - c. Direktur Pengendalian Program dan Anggaran, Ditjen Strahan, Kemhan;
 - d. Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Antar Negara, Ditjen BAK, Kemendagri;
 - e. Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri;
 - f. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 - g. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - h. Direktur C Bais TNI;
 - i. Direktur Intelijen Geospasial, Deputi-V BIN;
 - j. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG;
 - k. Paban I Srenum TNI;
 - l. Paban I Asrena AD;
 - m. Paban VI Ops DN Sopsad;
 - n. Paban III Aslog AD;
 - o. Pamen Ahli Bid OMP Pangdam XII/Tpr
 - p. Perencana Ahli Madya pada Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP;

- q. Perencana Ahli Muda pada Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP;
- r. JFU/Analis dan Staf di lingkungan Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP.

5. Diskusi Rapat

- a. Letkol Riyandi (wakil Asops Panglima TNI) ;
 - Saat ini Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (SATGAS PAMTAS) tetap melakukan kegiatan tugas pengecekan patok/pilar batas negara, tetapi masih ditemukan patok/pilar dalam keadaan rusak atau hilang;
 - Jumlah personel Satgas Pamtas yang digelar pada pos-pos di wilayah perbatasan masih sedikit, hal ini memengaruhi pemantauan aktivitas yang dapat menyebabkan hilang/rusaknya patok/pilar batas negara.
 - Selama ini masih lemahnya kesadaran masyarakat atas pentingnya pilar/patok batas sebagai titik batas wilayah antar negara dalam menjaga kadulatan wilayah NKRI;
- b. Pak Rizal Kasubdit Batas Antar Negara KEMENDAGRI (Wakil Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Antar Negara):
 - Perlu dibuat terlebih dahulu konsep pemberdayaan masyarakat untuk menjaga dan memelihara pilar/patok batas negara;
 - Perlu melihat kesiapan pemerintah daerah untuk pelaksanaan program sehingga program yang akan dilaksanakan dapat terkoordinasi dengan baik.
- c. Letkol Amin, Ctp
 - Patok/pilar batas negara merupakan titik dalam pemetaan wilayah negara, dalam hal patok/pilar batas negara dalam keadaan hilang dapat menyebabkan kesusahan pada Tim Teknis penyelesaian batas antar Indonesia-Malaysia, RI-PNG dan RI-RDTL.
 - Sudah seharusnya masyarakat dilibatkan secara aktif di wilayah terdekat perbatasan untuk ikut menjaga dan memelihara tanda batas negara. Sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya bahwa personel yang ditugaskan di perbatasan sangat sedikit jika dibandingkan dengan panjang batas antar negara dengan negara tetangga.

6. Hasil Rapat

- a. Perlu disesuaikan konsep pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan sebagai Bagian dari Sishankam
- b. BNPP Perlu mengkoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah terkait sebelum pelaksanaan kegiatan;
- c. BNPP perlu melihat wilayah yang memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan sebagai bagian dari Sishankam; dan
- d. Kegiatan yang melibatkan masyarakat perlu diikutsertakan pemerintah desa dan/atau tokoh-tokoh wilayah sebagai contoh untuk seterusnya disampaikan kepada masyarakat yg tidak dapat terakomodir.

Lampiran 13. Undangan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sambas



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
Jalan Kebon Sirih Nomor 31 Jakarta Pusat-10340 Telp: 021-3142242 Website: www.bnpp.go.id

Nomor : 581/AI/DI/X/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 28 Oktober 2022

Yth. Para Pejabat dalam Daftar Terlampir
di-

Tempat

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka Peningkatan Pertahanan Wilayah Negara dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP), Badan Nasional Pengelola Perbatasan c.q Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara akan melaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 November 2022
Waktu : 09.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula Kantor Bupati Kabupaten Sambas
Jl. Pembangunan, Dalam Kaum, Kec. Sambas, Prov. Kalimantan Barat
Agenda : Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Sebagai Bagian Dari Sistem Pertahanan Keamanan.

Pelaksanaan rapat dimaksud tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Novi Nur Aini HP. 082158805865 atau email: asdepbatasdarat@gmail.com, atau Fax (021) 021-3140461.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**ASISTEN DEPUTI
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT,**



Drs. ISMAWAN HARIJONO, M.Si

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris BNPP, sebagai laporan.
2. Bapak Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP.

LAMPIRAN SURAT ASDEP PENGELOLAAN
BATAS NEGARA WILAYAH DARAT, BNPP
NOMOR : 581/AI/DI/X/2022
TANGGAL : 28 Oktober 2022

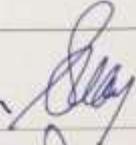
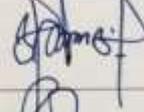
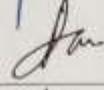
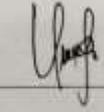
DAFTAR PESERTA

**RAPAT KOORDINASI RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA TERDEPAN PERBATASAN NEGARA SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERTAHANAN
KEAMANAN**

1. Bupati Kabupaten Sambas;
2. Sekretaris Daerah Kab. Sambas;
3. Kepala Dinas Sosia Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
4. Camat Sajingan Besar, Sambas;
5. Camat Paloh, Sambas;
6. JFU dan Staf di lingkungan Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP.

Lampiran 14. Daftar Hadir Rapat Koordinasi dengan Pemerintah kabupaten Sambas

ABSENSI RAPAT KOORDINASI
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN
 SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN
 Sambas,

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	Drs. Suryono, M.Si	Asisten penerangan	
2.	ISUANDI	keang. tapem	
3.	Teguh Suharsano	Sek. kordinasi Bag. Tapem	
4.	Karida	Staf Bag. Tapem	
5.	Van Mahista	Staf bag tapem	
	Sessy Angelina	Staf bag. TP	
	DIONISIUS LEANDER	Bagian. tapem	
	Dea Bastika	Bagian Tapem	
	Uray Jubarzi	Bagian Tapem	

Lampiran 15. Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sambas



Lampiran 16. Notulensi Rapat Koordinasi dengan Kabupaten Sambas

NOTULENSI

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PMD

PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 1 NOVEMBER 2022

1. DAERAH :
 - a. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat
 - b. Kabid koordinasi perencanaan dan monitoring
 - c. Kasi Monev
 - d. Staf
2. Penyampaian Maksud dan Tujuan
 - a. Dalam rangka menindaklanjuti hasil pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem hankam di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022.
 - b. Penyampaian Modul sebagai pedoman dalam pelaksanaan PMD-TPNSBSH
3. Pemaparan Asdep
 - a. Pentingnya peran serta masyarakat perbatasan untuk ikut serta dalam pengamanan perbatasan khususnya patok/pilar batas negara yang merupakan tanda batas kedaulatan negara.
 - b. Saat ini pengamanan perbatasan dilakukan oleh TNI, yang mana dari data yang dihimpun rasio satgas pamtas dengan panjang batas masih kurang yang mana untuk Kalimantan 1:2,2 yaitu 1 orang satgas menjaga 2,2 km panjang batas . melihat hal ini efektivitas penjagaan pengamanan perbatasan kurang optimal. Untuk itulah, peran serta masyarakat sangat diperlukan.
 - c. Kedepannya untuk jangka menengah dan jangka panjang dari PMD-TPNSBSH ini adalah pembentukan masyarakat/desa MENTAS (Menjaga Perbatasan).
 - d. Analisa stakeholder: latents, promoters, apatetics, defenders
 - e. RKTTL dan hasilnya akan dilakukan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan di lapangan dan juga sebagai bahan untuk pemeliharaan patok/pilar batas negara melalui kegiatan IRM (Investigation, Refixation and Maintenance)
 - f. Untuk keberlanjutan program, pemerintah pusat dalam hal ini BNPP dan Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dan berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan.
4. Masukan dari Kepala BPPD
 - a. Program PMD-TPNSBSH sangat komprehensif
 - b. Kecamatan yang ada di Kalimantan Barat ada 14
 - 2 sambas
 - 6 kapuas Hhu
 - 2 entikong
 - 2 sintang
 - c. Kecamatan Empanang setelah dipecah menjadi 2 ada 1 desa yang berbatasan dengan malaysia tapi masuk Puring Kencana
 - d. Kecamatan hulu Kapuas tidak masuk dalam perbatasan.
 - e. Harus ada data patok beserta kondisinya.
 - f. Usulan : untuk evidence kondisikan bentuk mentas di salah satu kabupaten, peserta yang telah mengikuti kukuhkan melalui Surat Keputusan.
 - g. Dalam uu 43/2008 tentang wilayah negara jelas tercantum pembagian kewenangan tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun belum ada upaya yg cukup intensif untuk menggerakkan masyarakat di perbatasan. Harapannya semoga setelah selesai benar2 dilakukan.
 - h. Ikutkan kompetisi sinovatik

- i. Kedepan, dikompetisikan desa mana yang bagus akan diberikan tambahan anggaran.
 - j. Walaupun di desa sudah ada dana desa (Pusat) dan alokasi dana desa (Kabupaten), sehingga sebenarnya desa punya dana yg lebih besar dari kecamatan tapi pengalokasiannya sangat ketat, untuk hal ini (pengelolaan perbatasan) tidak bisa karena hal ini adalah urusan pemerintah pusat. Masukannya dalam perka mengatur untuk hal tersebut khususnya desa perbatasan untuk pengelolaan tanda batas. Dengan adanya keuangan daerah akan lebih maksimal tanpa menunggu anggaran dan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.
5. Masukan dari Kabid BPPD
- a. Intervensi keuangan desa terhadap pengamanan perbatasan melalui dana desa dan APBD untuk keberlanjutan kegiatan.

KABUPATEN SAMBAS, 2 NOVEMBER 2022

1. Daerah :
 - a. Asisten 1 kabupaten Sambas
 - b. Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Sambas
 - c. Pejabat dan staf pada bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sambas
2. Penyampaian maksud dan Tujuan oleh Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
 - a. Evaluasi terhadap kegiatan PMD yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2022 di Kabupaten Sambas
3. Pemaparan Asisten deputi tasrat
 - a. Mekanisme pelaporan dari masyarakat sampai ke tingkat pusat
 - b. Pemaparan terkait modul metode , modul fasilitator, modul penyelenggaraan, modul himpunan materi.
 - c. Pergeseran minimnya infrastruktur ke ekonomi
4. Masukan dari Asisten 1 Kab Sambas
 - a. Plbn aruk diresmikan Jokowi tahun 2017, infrastrukturnya sudah bagus
 - b. Harapannya bagaimana bnpp semakin intens memberikan kegiatan khususnya kepada masyarakat di perbatasan sehingga meningkatkan mindset untuk dapat berperan serta menjaga perbatasan
 - c. Inpres 1 tahun 2021 ttg percepatan ekonomi khususnya di plbn aruk luar biasa mengikuti 9 kecamatan sangat berdampak pada aktivitas dinamika dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - d. Semoga proper ini dapat berguna dan bermanfaat
 - e. Akan berdampak pada bbrp kegiatan di masyarakat dan pembangunan.

Lampiran 17. Undangan Rapat Penyusunan Modul dengan Mitra K/L



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

Jalan Kebon Sirih Nomor 31, Jakarta Pusat-10340 Telp: 021-3142242 Website: www.bnpp.go.id

Nomor : 571/Al/DI/X/2022 Jakarta, 24 Oktober 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Para Pejabat dalam Daftar Terlampir
di-

Tempat

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka Peningkatan Pertahanan Wilayah Negara dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP), Badan Nasional Pengelola Perbatasan c.q Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat akan melaksanakan Rapat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022
Waktu : 09.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Orchard Industri Hotel
Jl. Industri Raya No. 8, Gunung Sahari 10720 Jakarta
Agenda : Penyusunan Modul Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara.

Pelaksanaan rapat dimaksud tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Novi Nur Aini HP. 082158805865 atau email: asdepbatasdarat@gmail.com, atau Fax (021) 021-3140461.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**ASISTEN DEPUTI
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT,**



Drs. ISMAWAN HARJONO, M.Si

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris BNPP, sebagai laporan.
2. Bapak Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP.

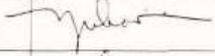
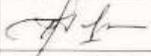
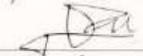
LAMPIRAN SURAT ASDEP PENGELOLAAN
BATAS NEGARA WILAYAH DARAT, BNPP
NOMOR : 571/AI/DI/X/2022
TANGGAL : 24 Oktober 2022

**DAFTAR PESERTA
RAPAT KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN
PERBATASAN NEGARA DALAM MENJAGA PERTAHANAN KEAMANAN
MELALUI PENJAGAAN PILAR BATAS NEGARA**

1. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP;
2. Asops Panglima TNI;
3. Asrenum Panglima TNI;
4. Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kemhan;
5. Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, BNPP;
6. Asdep Pengelolaan Lintas Batas Negara, BNPP
7. Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Antar Negara, Ditjen BAK, Kemendagri;
8. Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kemlu;
9. Direktur Wilayah Pertahanan, Strahan, Kemhan;
10. Direktur Pengendalian Program dan Anggaran, Ditjen Renhan, Kemhan;
11. Direktur Topografi, TNI AD;
12. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG;
13. Kepala Kelompok Sahli Pangdam XII/Tpr;
14. Paban VI Surta/Sops Mabes TNI;
15. Paban I Srenum TNI;
16. Paban I Asrena AD;
17. Paban III Aslog AD;
18. Asops Kasdam, XII Tpr;
19. Kaurtatematik Silahdata Topdam XII/Tpr;
20. Perencana Ahli Madya pada Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP;
21. Perencana Ahli Muda pada Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP;
22. JFU dan Staf di lingkungan Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP.

Lampiran 18. Daftar Hadir Rapat Penyusunan Modul dengan Mitra K/L

DAFTAR HADIR PESERTA
 RAPAT KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN PERBATASAN NEGARA DALAM MENJAGA
 PERTAHANAN KEAMANAN MELALUI PENJAGAAN PILAR BATAS NEGARA
 ORCHARDZ INDUSTRI HOTEL, 27 OKTOBER 2022

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	ISMAELIAN	Asdep Batas Dalam	BAPP	
2.	Agustin Sugala	Kerjasama Masyarakat Desa	BAPP	
3.	Tullians	Perencanaan Masyarakat Timor	BAPP	
4.	Hasan Anwaruloh	Pabatan I / (Dahlaning Srenad Cenahak)	Stena TNI AD	
5.	PULUNG	Pabatan I / (Srenad Cmaik)	SRTMUM TNI	
6.	Rahandi	Pabatan I / (Kopors OPIDagri Sops TNI)	NAKES TNI	
7.	Arif F	Surta	BIG	
8.	Ardiawan Jati	Surta	BIG	

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
41.	Ryan Rizki	UPV	BAPP	
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				

Lampiran 19. Dokumentasi Penyusunan Modul dengan mitra K/L



Lampiran 20. Notulensi Rapat Penyusunan Modul dengan Mitra K/L



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
Jalan Kebon Sirih Nomor 31, Jakarta Pusat 10340
Telepon (021) 3142142, Fax. (021) 31924491, Website: <http://www.bnpp.go.id>

NOTULENSI RAPAT

Judul Kegiatan : Rapat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara.

Tanggal : 27 Oktober 2022

Tempat : Orchardz Industri Hotel, Jakarta

Waktu : 09.30 WIB

Poin-Poin Hasil Kegiatan:

1. Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP dengan peserta rapat yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, sebagai berikut:
 - a. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, BNPP;
 - b. Paban I Srena AD;
 - c. Pabandya 3 Spaban 1 Srenum TNI;
 - d. Padya I Siaops Opsdagri TNI;
 - e. Spaban VI/Sops TNI;
 - f. Paban C4 Bais TNI;
 - g. Analls Kebijakan Madya Dalprogar, Ditjen Renhan Kemhan;
 - h. Analls Kebijakan Ditwilhan, Ditjen Strahan, Kemhan;
 - i. Analls Surveyor, PPBW, Badan Informasi Geospasial;
 - j. Staf pada Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Ditjen HPI, Kementerian Luar Negeri;
 - k. Kabag Duknistop Subdit Binduktup Dittopad;
 - l. Kodam XII/Tanjungpura.
2. Agenda Rapat:
Penyusunan Modul Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara.
3. Maksud dan Tujuan Rapat:
 - a. Penyampaian Modul sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara.
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Modul kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara dengan Mitra Kementerian/Lembaga terkait.
4. Pembahasan:
 - a. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat:
 - 1) Peningkatan Pertahanan Wilayah Negara merupakan salah satu arahan sasaran strategis dalam pengelolaan batas negara wilayah darat. Diperlukan usaha dan dukungan dari semua komponen dalam menjaga perbatasan negara. Peran serta masyarakat perbatasan untuk ikut serta dalam pengamanan perbatasan khususnya patok/pilar batas negara yang

merupakan tanda batas kedaulatan negara bisa dijadikan kekuatan penting dalam upaya peningkatan pertahanan wilayah negara.

- 2) Saat ini pengamanan perbatasan dilakukan oleh TNI, yang mana dari data yang dihimpun rasio satgas pamtas dengan panjang batas masih kurang yang mana untuk Kalimantan 1:2,2 yaitu 1 orang satgas menjaga 2,2 km panjang batas . melihat hal ini efektivitas penjagaan pengamanan perbatasan kurang optimal. Untuk itulah, peran serta masyarakat sangat diperlukan.
- 3) Kedepannya untuk jangka menengah dan jangka panjang dari Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara ini adalah pembentukan masyarakat/desa MENTAS (Menjaga Perbatasan).
- 4) Diperlukan penyusunan modul Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara sebagai media informasi dan pembelajaran bagi masyarakat desa terdepan.

b. Perwakilan Kementerian Pertahanan:

- 1) Menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- 2) Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran dan fungsi Pemerintah desa dalam penguatan pertahanan dan keamanan perbatasan negara ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

c. Perwakilan Mabes TNI

- 1) **Malaysia berbatasan dengan :**

- 3 Provinsi;
- 8 Kabupaten;
- 32 Kecamatan
- 96 Desa

Dengan Panjang Perbatasan : 2062 km

Sehingga membutuhkan Pengawasan dan Pengamanan yang komprehensif.

- 2) **Batas Wilayah Negara** adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
- 3) Untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan di lingkungan, pemerintah desa di perbatasan negara harus bersinergi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas melalui koordinasi kepala desa sekitar bersama-sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga stabilitas keamanan di batas wilayah negara.
- 4) Tugas masyarakat adalah Masyarakat hanya mengamati dan mencatat pilar yang pindah, rusak atau miring atau hampir terbenam. Perlu diperhatikan bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau memperbaiki pilar batas negara.

5. Saran

- 1) Memasukkan di modul tentang program – program yang dapat dilakukan pemerintah Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa terdepan.
- 2) Membuat kegiatan kunjungan lapangan bagi masyarakat untuk mengetahui secara langsung terkait kondisi pilar batas negara.
- 3) Memasukkan di modul informasi tentang pengamanan dan pemeliharaan pilar/tugu batas negara, Pelaksana : Pamtas TNI
IRM (Identification, Refixation and Maintenance) : Bilateral (kedua belah Negara Indonesia dan Malaysia)
Pra IRM : Unilateral (hanya Indonesia)

6. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugasnya, BNPP tidak dapat bekerja sendiri, BNPP yang beranggotakan 27 Kementerian/Lembaga serta Gubernur di Batas Wilayah Negara juga memerlukan peran dari masyarakat setempat untuk membantu menjaga kedaulatan negara karena bagaimanapun juga yang berada di garda terdepan negara adalah para masyarakat tersebut. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui akan kebijakan pengelolaan batas wilayah negara, peraturan hukum yang bersinggungan langsung dengan kawasan perbatasan negara, arahan Mendagri selaku Kepala BNPP tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, serta tahapan penentuan garis batas negara

Lampiran 21. Undangan Rapat Penyusunan Modul dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
Jalan Kebon Sirih Nomor 31, Jakarta Pusat-10340 Telp: 021-3142242 Website: www.bnpp.go.id

Nomor : 582/AI/DI/X/2022 Jakarta, 28 Oktober 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Para Pejabat dalam Daftar Terlampir
di-
Tempat

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka Peningkatan Pertahanan Wilayah Negara dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP), Badan Nasional Pengelola Perbatasan c.q Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat akan melaksanakan Rapat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 1 November 2022
Waktu : 09.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Kantor BPPD Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Ahmad Yani No. 1, Pontianak
Agenda : Penyusunan Modul Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara.

Pelaksanaan rapat dimaksud tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Novi Nur Aini HP. 082158805865 atau email: asdepbatasdarat@gmail.com, atau Fax (021) 021-3140461.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**ASISTEN DEPUTI
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT,**



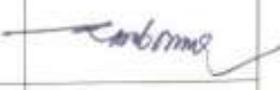
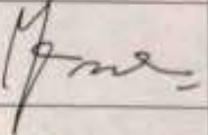
Drs. ISMAWAN HARJONO, M.Si

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris BNPP, sebagai laporan.
2. Bapak Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP.

Lampiran 22. Daftar Hadir Rapat Penyusunan Modul Kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

**DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN MODUL KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
TERDEPAN PERBATASAN NEGARA DALAM MENJAGA PERTAHANAN KEAMANAN
MELALUI PENJAGAAN PILAR BATAS NEGARA
PONTIANAK, 1 NOVEMBER 2022**

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Alexander Rambanang	Kabon	
2	IS M... ..	As Dep TASN	
3	Ganda Y. Butarbutar	kobid	
4	Sri Nurhayati	Kabid Kes per & Fisik	
5	AGUS HERI WITO	Kasi monav PP BPPD prov kab Bar	
6	Hendri Saputra	Staf BPPD	
7	Pretty R. H	Kasi koordinasi perencana	
8	Heru ushyu. P	Asis Jastab	
9	Hegz Mituan	Perencana des' mit bupp	
10	Jeni Ekawati	Staf BPPD	
11	Tayani	Bansu Athi Noda BNSP	

Lampiran 23. Dokumentasi Rapat Koordinasi Penyusunan Modul dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



Lampiran 24. Notulensi Rapat Penyusunan Modul dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

Jalan Kebon Sirih Nomor 31, Jakarta Pusat 10310

Telpon (021) 3142142, Fax. (021) 31924491, Website: <http://www.bnpp.go.id>

NOTULENSI RAPAT

Judul Kegiatan : Rapat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara.

Tanggal : 1 November 2022

Tempat : Kantor BPPD Provinsi Kalimantan Barat

Waktu : 09.30 WIB

Poin-Poin Hasil Kegiatan:

1. Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP dengan peserta rapat yang dihadiri oleh:
 - a. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, BPPD Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan, BPPD Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. Kepala Seksi Koordinasi Perencanaan, BPPD Provinsi Kalimantan Barat;
 - e. Kepala Seksi Koordinasi Fasilitas Kerjasama, BPPD Provinsi Kalimantan Barat;
 - f. Kepala Seksi Koordinasi Pelaksanaan Pengelola Perbatasan, BPPD Provinsi Kalimantan Barat;
 - g. Kepala Seksi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan, BPPD Provinsi Kalimantan Barat;
 - h. Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP;
 - i. Staf pada BPPD Provinsi Kalimantan Barat.
2. Agenda Rapat:
Penyusunan Modul Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara.
3. Maksud dan Tujuan Rapat:
 - a. Penyampaian Modul sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara.
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Modul kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara dengan Stakeholders terkait.
4. Pembahasan:
 - a. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat

- 1) Pentingnya peran serta masyarakat perbatasan untuk ikut serta dalam pengamanan perbatasan khususnya patok/pilar batas negara yang merupakan tanda batas kedaulatan negara.
- 2) Saat ini pengamanan perbatasan dilakukan oleh TNI, yang mana dari data yang dihimpun rasio satgas pamtas dengan panjang batas masih kurang yang mana untuk Kalimantan 1:2,2 yaitu 1 orang satgas menjaga 2,2 km panjang batas. melihat hal ini efektivitas penjagaan pengamanan perbatasan kurang optimal. Untuk itulah, peran serta masyarakat sangat diperlukan.
- 3) Kedepannya untuk jangka menengah dan jangka panjang dari Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara ini adalah pembentukan masyarakat/desa MENTAS (Menjaga Perbatasan).
- 4) Analisa stakeholder: latents, promoters, apatetics, defenders
- 5) RKTTL dan hasilnya akan dilakukan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan di lapangan dan juga sebagai bahan untuk pemeliharaan patok/pilar batas negara melalui kegiatan IRM (Investigation, Refixation and Maintenance)

b. Kepala BPPD Provinsi Kalimantan Barat

- 1) Mendukung proyek perubahan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara karena sangat komprehensif dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di perbatasan dan dalam menjaga batas negara RI.
- 2) Kecamatan yang ada di Kalimantan Barat ada 14. Kecamatan Empang setelah dipisah menjadi 2, ada 1 desa yang berbatasan dengan Malaysia tapi masuk Puring Kencana. Kecamatan hulu Kapuas tidak masuk dalam perbatasan.
- 3) Harus ada data patok beserta kondisinya.
- 4) Dalam uu 43/2008 tentang wilayah negara jelas tercantum pembagian kewenangan tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun belum ada upaya yg cukup intensif untuk menggerakkan masyarakat di perbatasan. Harapannya semoga setelah selesai benar-benar dilakukan. Iktukan kompetisi sinovatik.
- 5) Walaupun di desa sudah ada dana desa (Pusat) dan alokasi dana desa (Kabupaten), sebenarnya desa punya dana yg lebih besar dari kecamatan tapi pengalokasiannya sangat ketat, untuk hal ini (pengelolaan perbatasan) tidak bisa karena hal ini adalah urusan pemerintah pusat.
- 6) Intervensi keuangan desa terhadap pengamanan perbatasan melalui dana desa dan APBD untuk keberlanjutan kegiatan.

5. Saran

- a. Dalam perka mengatur tentang alokasi anggaran antara dana desa pusat dan kabupaten khususnya desa perbatasan untuk pengelolaan tanda batas. Dengan adanya keuangan daerah akan lebih maksimal tanpa menunggu anggaran dan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.
- b. Untuk eviden kondisikan bentuk mentas di salah satu kabupaten, peserta yang telah mengikuti kukuhkan melalui Surat Keputusan.
- c. Kedepan, dikompetisikan desa mana yang bagus akan diberikan tambahan anggaran.

6. Kesimpulan

Untuk keberlanjutan proyek perubahan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara sangat komprehensif dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di perbatasan dan dalam menjaga batas negara RI, pemerintah pusat dalam hal ini BNPP dan Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dan berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan. Diperlukan juga dukungan dan sinergitas kerjasama dari pemerintah daerah untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini.

Lampiran 25. Modul Panduan Fasilitator



Lampiran 26. Modul Himpunan Materi



Lampiran 27. Modul Petunjuk Pelaksanaan Bimtek



Lampiran 28. Surat Undangan Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Pilot Project



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

Nomor : 590/A1/DI/XI/2022
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Undangan Rapat Persiapan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terdepan Perbatasan Negara sebagai
Pilot Project

Jakarta, 4 November 2022

Yth. Pegawai di lingkungan Asisten Deputi
Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
di -
Tempat

Menindaklanjuti hasil rancangan Proyek Perubahan dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara" oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat. Terkait dengan hal tersebut dibutuhkan rapat koordinasi di internal Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat dalam rangka persiapan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project* yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 7 November 2022
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat di Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
Agenda : Rapat Persiapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project*

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

ASISTEN DEPUTI
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT,



Drs. ISMAWAN HARIJONO, M.Si.

Lampiran 29. Daftar Hadir Pelaksanaa Rapat Internal



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIC INDONESIA**
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Rapat Persiapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terdepan Perbatasan
Tanggal : 7 November 2022
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat di Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah
Darat

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ismawan H	Asdep Tastrat	
2.	Agustin Sangle	Perencana Ahli Muda	
3.	SAUD SEKAJATRB	Perencana muda	
4.	Tanjung	Perencana Ahli Muda	
5.	Hega Mitusari	Perencana Ahli Muda	
6.	M. Syamudin	Staf	
7.	Puspita Hanum D.S	Staf Tastrat	
8.	Ajeng Setry Kinanti	JFU Tastrat	
9.	Novi Nur Aini	JFU Tastrat	
10.	Riva Febriata M	JFU Tastrat	
11.	Riky Shamsu	Staf Tastrat	
12.	Nicholas Fajar Wandi	Staf Tastrat	
13.	Prosa Uli Riwandina	Staf Tastrat	
14.	Nambanto	Staf Tastrat	
15.	Dika Sabudin	Staf	
16.	TOBARI TOHAYADI	JFU Tastrat	
17.	William Tefred	Tastrat	

Lampiran 30. Dokumentasi Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan



Lampiran 31. Notulensi Rapat Internal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Nama : Drs. Ismawan Harijono, M.Si.
NIP : 196902031989021001
Unit Kerja : Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Jabatan : Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
Kegiatan : Diskusi Persiapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project*
Tanggal : Senin, 7 November 2022

Notulensi :

1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project* akan dilaksanakan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23-25 November 2022.
2. Pada tanggal 9-12 November 2022 Tim AJU akan melakukan koordinasi dengan Dinas Tata Pemerintahan Kabupaten Sambas, Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Sambas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Provinsi Kalbar.
3. Membuat daftar kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project*.
4. Membagi penanggung jawab untuk masing-masing tugas pada saat pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project*.
5. Menyusun surat undangan untuk peserta dan narasumber.
6. Memastikan kesediaan narasumber untuk hadir dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project*.
7. Perencanaan konsep acara dan jadwal kegiatan di lapangan.

Lampiran 32. Dokumentasi Tim Aju





Lampiran 33. Notulensi Tim Aju



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

NOTULENSI

Tanggal : 9-12 November 2022
Tempat : Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Agenda : Laporan Koordinasi dengan Pemda Terkait Kegiatan Uji Coba Modul

A. Agenda Kegiatan

1. Penyampalan referensi materi dan koordinasi persiapan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project* dengan Pemda Provinsi Kalimantan Barat dan Pemda Kabupaten Sambas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sambas;
 - b. Sekretaris Dinas Sosial, PMD Kabupaten Sambas;
 - c. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.
2. Peninjauan serta pengecekan lokasi kegiatan pembelajaran dalam kelas; dan
3. Survey lokasi patok/pilar batas negara D200 yang berada di sisi PLBN Aruk yang akan dijadikan pembelajaran dalam kegiatan tinjauan lapangan.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan

1. Maksud:
Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project* di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
2. Tujuan:
Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, dan pihak pendukung rencana kegiatan serta pengumpulan informasi dan data pendukung yang diperlukan guna terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project*.

C. Hasil dari Koordinasi:

1. Koordinasi dengan Dinas Tata Pemerintahan Kabupaten Sambas:
 - a. Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada tanggal 23-25 November 2022 di Kabupaten Sambas. Dinas Tapem Kabupaten Sambas siap mendukung kegiatan tersebut;
 - b. Penyiapan peserta akan dikoordinasikan lebih lanjut di tingkat kecamatan dan desa oleh bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sambas setelah adanya surat pemberitahuan kepada Bupati Sambas;
 - c. Peserta yang menjadi target kegiatan sebanyak 90 (sembilan puluh) orang yang berasal dari 7 (tujuh) desa dalam 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar. Adapun desa yang dimaksud ialah:
 - 1) Desa Sebus;
 - 2) Desa Temajuk;
 - 3) Desa Sungai Bening;
 - 4) Desa Kaliau;
 - 5) Desa Sebunga;
 - 6) Desa Sentaban; dan
 - 7) Desa Senatab.
2. Koordinasi dengan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Sambas
 - a. Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Sambas akan dilibatkan sebagai Tim Penyuluh dengan pokok kegiatan:
 - 1) Mendukung untuk melanjutkan kegiatan PMD;
 - 2) Pellabatan dalam kunjungan lapangan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan refleksi hasil kunjungan lapangan;

- 3) Untuk transportasi mobilisasi peserta dalam kunjungan lapangan ke Pilar/Patok D200 di PLBN Aruk, tidak tersedia mobil Pemda yang kondusif, sehingga dicarikan alternatif penyewaan dari Perusahaan yang ada di Kabupaten Sambas.
 - b. Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Sambas pada prinsipnya mendukung pelaksanaan kegiatan dan bersedia menjadi Tim Penyuluh untuk persiapan materi terkait aspek hankam, Tim BNPP telah menyampaikan referensi terkait aspek hankam;
3. Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar: Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Sambas akan dilibatkan sebagai Tim Penyuluh dengan pokok kegiatan:
 - a. Peran Serta Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara Sebagai Bagian Dari Sistem Pertahanan Dan Keamanan Perbatasan Negara dalam konteks Peran Serta Lembaga Ketahanan Desa (LKD) dan Mitra Desa dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - b. Pelibatan dalam kunjungan lapangan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan refleksi hasil kunjungan lapangan.
 4. Lokasi survey patok/pilar batas negara, untuk kunjungan kerja Lapangan: Survey patok/pilar batas negara type D - D 200 (Koordinat RSO 73527.39° - 109402.6°), D 199 (Koordinat RSO 73607.27° - 109314.6°) dan D 198 berada disebelah kiri Pos Lintas Batas Negara Aruk berjarak ± 100 M
- b. Saran
1. Perlu penetapan komunitas Desa Mentas bagi peserta kegiatan PMD dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Program Desa Mentas yang diinisiasi oleh Settap BNPP menjadi BAGIAN PELAKSANAAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN dalam RPJMDesa dan/atau RKPDesa;
 - b. Langkah percepatan yang dilakukan terutama adalah merevisi RPJMDesa dan RKPDesa serta menjadi prioritas kegiatan (Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa);
 - c. Mengakomodir materi pembahasan Desa Menjaga Batas dalam setiap Musyawarah Desa yang dibahas setiap tahun oleh BPD;
 - d. Mengakomodir program/kegiatan ini pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
 2. Sebagai tanda penghargaan, diharapkan peserta dapat dibuatkan pln tanda keanggotaan karena telah mengikuti kegiatan PMD di Kabupaten Sambas.

Demikian kami laporkan, untuk menjadi periksa dan mohon arahan lanjut

Drs. Ismawan Harijono, M.Si.

Tembusan:

Yth Bapak Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, sebagai laporan.

Lampiran 34. Surat Pemberitahuan dan Pemanggilan Peserta



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

Nomor : 612/A1/DI/XI/2022 Jakarta, 11 November 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan dan Pemanggilan Peserta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project*

Yth. Bupati Sambas
di
Sambas

Dengan hormat dipermaklumkan bahwa dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project*. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pejabat/Staf Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kodim, Polres, Kecamatan, Koramil, Polsek, Pos Pamtas, Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Satlinmas serta Satgas Covid-19 di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu s.d. Jum'at
Tanggal : 23-25 November 2022
Jumlah Peserta : Peserta berasal dari 7 (tujuh) desa yang ada di Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar dengan rincian sebagai berikut:
1) Setiap desa berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas: Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Satlinmas;
2) 2 (dua) orang dari Pemerintah Kecamatan Paloh dan 3 (tiga) orang dari Pemerintah Kecamatan Sajingan Besar;
3) 4 (empat) orang dari Sub Bagian Perbatasan Tata Pemerintahan Kabupaten Sambas;
4) 3 (tiga) orang dari Satgas Covid-19 Kabupaten Sambas.
Waktu : Sesuai jadwal terlampir
Tempat : Hotel Pantura Jaya
Jl. Tabrani No.62A, Durian, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, 68516.

Berkenaan hal tersebut, mengharap bantuan Bapak Bupati untuk menghadirkan peserta dari unsur OPD, Satgas Covid-19, dan unsur masyarakat desa sebagaimana disebutkan pada rincian peserta di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nama calon peserta Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project* dengan identitas/biodata lengkap (nama, jabatan, nomor HP, dan alamat) dikirimkan melalui Sdr. Irwan, S.STP pada nomor 082112403613 atau email: asdepbatasdarat@gmail.com paling lambat tanggal 18 November 2022.
2. Selama proses kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan sebagai *Pilot Project*, akomodasi dan konsumsi peserta ditanggung oleh panitia penyelenggara.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

**ASISTEN DEPUTI
PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT,**



Drs. ISMAWAN HARIJONO, M.Si.

TEMBUSAN:

1. Yth. Sekretaris BNPP, sebagai laporan.
2. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.

Lampiran 35. Nota Dinas Pelaksanaan *Pilot Project*



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT**

NOTA DINAS

Nomor: 637/A1/DI/XI/2022

Yth : Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara
Dari : Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat
Hal : Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project*
Tanggal : 28 November 2022

Dalam rangka Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan sebagai *Pilot Project* di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 23 s.d 25 November 2022. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksana Kegiatan
Seluruh Pejabat dan Staf pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP.
2. Maksud dan Tujuan Kegiatan
 - a. Maksud
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan merubah sikap peserta Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara.
 - b. Tujuan
 - 1) Memahami Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - 2) Memahami Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 3) Memahami Sistem Pengamanan Perbatasan Terpadu (*Integrated Border Security Systems*);
 - 4) Terampil Mengidentifikasi dan Melaporkan Kondisi Patok/Pilar Batas Negara;
 - 5) Penguatan Peran Serta dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Pertahanan dan Keamanan Garis Batas Negara;
 - 6) Memahami Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Mitra Desa dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - 7) Memahami Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - 8) Terampil dalam Tata Cara Pelaporan Terkait Dengan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan;
 - 9) Menyepakati Pambulatan Materi Fasilitasi;
 - 10) Menyusun Forum Masyarakat menjaga Perbatasan; dan
 - 11) Menyusun Rencana Tindak Lanjut Kegiatan.
3. Hasil dari kegiatan fasilitasi yang telah dilaksanakan, dapat kami laporkan sebagai berikut:
 - a. Tujuan kegiatan adalah agar terbekalinya berbagai *stakeholders* di Kawasan perbatasan negara untuk menjadi bagian integral dari sistem pengamanan perbatasan, khususnya pengamanan batas negara wilayah darat dan lintas batas negara;
 - b. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project* dilaksanakan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23 s.d 25 November 2022;
 - c. Kegiatan di Kabupaten Sambas diikuti oleh 90 peserta yang terdiri atas unsur Aparat Pemerintah Kabupaten Sambas, Satuan Teritorial TNI (Kodim/Koramil), Satuan Wilayah Kepolisian (Polres/Polsek), Satgas Covid-19 tingkat Kabupaten, Camat Perbatasan, Kepala Desa Perbatasan (dari Kecamatan Perbatasan), Tokoh

Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Satlinmas, serta Anggota Satgas Pamtas terdekat;

- d. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian materi di kelas (*Indoor activities*) dan kunjungan lapangan ke lokasi patok/pilar batas negara (*outdoor activities*). Kunjungan lapangan dilaksanakan di PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan Besar. Narasumber dan fasilitator selama pelaksanaan kegiatan adalah pejabat dari Mabes TNI, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, BPPD Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sambas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, dan BNPP (Deputi I dan Tim Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat);
 - e. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini telah melibatkan 7 (tujuh) desa perbatasan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Paloh: Desa Sebusub dan Desa Temajuk;
 - 2) Kecamatan Sajingan Besar: Desa Sebunga, Desa Sungai Bening, Desa Kaliau', Desa Senatab, dan Desa Santaban.
4. Kesimpulan
- a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai *Pilot Project* Tahun 2022 ini telah dilaksanakan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23 s.d 25 November 2022;
 - b. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyampaian materi di kelas dan kegiatan kunjungan lapangan dengan melibatkan 90 peserta dari Kabupaten Sambas;
 - c. Dengan adanya kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat dalam pertahanan dan keamanan garis batas negara, salah satunya yaitu patok/pilar batas negara.

Demikian kami laporkan, untuk menjadi periksa dan mohon arahan lanjut.



Drs. Ismawan Harjono, M.Si

Tembusan:

Yth Bapak Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, sebagai laporan.

**DOKUMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERDEPAN PERBATASAN NEGARA
SEBAGAI *PILOT PROJECT*
KABUPATEN SAMBAS, 2022**

